

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN  
HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH  
LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP**

(Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelara Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SYANDI AFRIANSYAH**  
**115010107111040**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREK (Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : SYANDI AFRIANSYAH**

**b. NIM : 115010107111040**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian : 7 Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 10 Agustus 2016**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. ....**

**Agus Yulianto, SH., MH  
NIP. ....**

**Mengetahui  
Kepala Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

**Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. ....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN  
HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH  
LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP  
(Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya)**

**Oleh**  
**SYANDI AFRIANSYAH**  
**115010107111040**

Skripsi ini Telah Di Sahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH., MH  
NIP. 195907171986011001

Mengetahui

Kepala Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Dekan  
Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. 196008101986011002

Dr. Rahmat Syafa'at, SH., M.Si  
NIP. 1962080511988021001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Kali Surabaya Oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempol Kerep”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT

Malang, 4 Juni 2016

Penulis,

Syandi Afriansah

## UCAPAN TERIMA KASIH

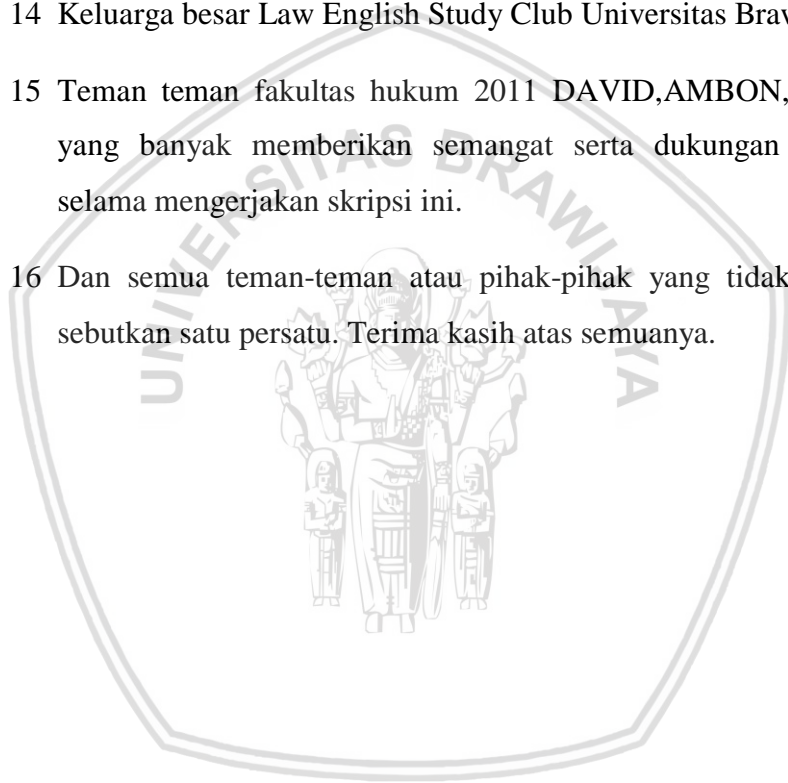
Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Mama dan Papa tercinta NYONYA WISMARIATY NAZAR dan BAPAK SYAFRIZAL ALI yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga, dan sebagai pasangan orangtua yang sangat amat luarbiasa hebat yang ada di dunia, dan juga orangtua yang sungguh luarbiasa buatku yang tidakpernah menunjukkan keluhannya dan kekecewaannya kepada kedua anak-anak nakalnya terutama saya walaupun sering di mintain jajan di saat-saat gak tepat dan sering dibohongin bahkan ketahuan.
2. Kakakku yang sangat ku cinta SYASTI WINDIASARY yang juga begitu banyak memacu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan omelan-omelan pedasnya yang selalu ada di setiap malam lewat telfon dan segala bantuan-bantuan dana dan pinjaman-pinjaman danaya yang sangat membantu untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Etek-etek dan Om tercinta yang sudah aku anggap sama persis seperti Mama dan papa kandungku sendiri ADE IRMA LINDA NAZAR, EFDHAL NAZAR, MAIMUNAH. Kalian sungguh om dan etek-etek yang sangat luarbiasa yang bersikap sama/bahkan terkadang lebih dari mama-papa kepada aku dalam memantau, memarahi, mengomeli dan menyayangiku setra mendukungku. Terutama buat TEK ADE yang paling ku sayangi “ Jangan was-was dan takut lagi ya tek sama kuliah dan masadepan dedek, ini dedek udah selesaikok skripsinya,

- selanjutnya bakal LULUS percaya lah tek “Etek Tanggungjawab Dedek. **Aku Anakmu**” jangan pernah nangis lagi “
- 4 Wanita bawel PUTRI SRI KASINTA yang selalu setia untuk tiada bersama, tapi setiap di telfon pasti selalu ingat dan yang pertamakali di tanyain “gimana skripsimu pin”, “sudah sampai mana pin”, “apa yang sulit atau gak bisa? Sini kirim email biar ku bantuin, biar kamu cepat lulus , biar bisa punya usaha”, “ kapan Kompre?yudisium?wisuda bla..bla..bla.. “. Trimakasih banyak buat semuanya ya put , aku doakan segalamacam yang terbaik buatmu nantinya AMIN.
  - 5 Teman-Teman/saudara-saudara seperjuangan PMP 2011 UCOK,AMIK,CINA,DANIL,KACONG,GENDUT RIRIN, DLL, kalian sangat berjasa selama ini buat ku, tanpa kalian aku juga gak akan bisa sampai ke tahap ini.
  - 6 Adik-adik PMP 2012,13,14,15 yang juga berjasa buat kuliah,hidup dan terselesaikannya skripsi ini walau kadang lebih seringnya dengan kata-kata gak enak “ Bang kapan lulus, ntar aku duluan loh “
  - 7 Bapak Dr.Rachmad Safa’at, SH, M Si, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
  - 8 Bapak Lutfi Effendi SH,Mhum selaku kepala program studi Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk,dorongan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
  - 9 Bapak Agus Yulianto, SH, MH selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan petunjuk,dorongan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
  - 10 Bapak Haru Permadi, SH,MH selaku dosen konsentrasi Hukum Administrasi Negara khususnya bidang ilmu hukum lingkungan yang

begitu banyak membantu, dan memberikan dukungan serta semangat, dan banyak waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

- 11 Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 12 Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 13 Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya
- 14 Keluarga besar Law English Study Club Universitas Brawijaya
- 15 Teman teman fakultas hukum 2011 DAVID, AMBON, ADAN DLL, yang banyak memberikan semangat serta dukungan kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
- 16 Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya.





## RINGKASAN

Syandi Afriansyah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP** (Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya), Lutfi Effendi, SH., Mhum., Agus Yulianto, SH., MH.

Penulis mengangkat permasalahan tentang penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup terkait kasus pencemaran kali Surabaya oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gempolkerep. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya kasus pencemaran sungai Surabaya oleh Limbah Pabrik Gula Gempolkerep yang menyebabkan matinya ratusan ikan dan rusaknya ekosistem sungai di Surabaya. Kasus pencemaran ini merupakan kasus kedua yang dilakukan oleh pihak Pabrik Gula Gempolkerep. Dari kasus ini, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Surabaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup terkait kasus pencemaran ini.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, dan (2) Apa kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarena peneliti akan melihat, mengamati dan menganalisis obyek penelitian yang di lihat dari sudut kenyataannya yang terdapat di lapangan, bukan dengan mengkaji peraturan-peraturan atau mengkaji norma-norma dan membandingkannya antara satu peraturan satu dengan yang lainnya seperti halnya yang dilakukan dalam jenis penelitian normatif.

Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya turut bertanggungjawab serta berkewajiban dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 76 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan hukum lingkungan administrasi sudah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya kegiatan pengendalian lingkungan sendiri mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya dianggap masih belum tegas dan terlalu longgar dalam menegakkan sanksi hukum lingkungan administrasi.



## SUMMARY

Syandi Afriansyah, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in August 2016, ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT BY THE ENVIRONMENT LAW INSTITUTE IN RELATED CASE OF POLLUTION IN SURABAYA RIVER BY WASTE PROCESSING OF GEMPOLKEREP FACTORY (Case Study ON Environmental Institute Surabaya), Lutfi Effendi, SH., Mhum ., Agus Yulianto, SH., MH.

The authors raise concerns about environmental enforcement by the Environment Institute regarding the case of contamination of times Surabaya by Waste Management Manufacturing Gempolkerep. Selection of these themes to a backdrop of Surabaya river pollution case by Sugar Factory Waste Gempolkerep which caused the death of hundreds of fish and damage the river ecosystem in Surabaya. This pollution case is the second conducted by the Sugar Factory Gempolkerep. Of these cases, researchers are interested in examining how the role of the Environment Agency Surabaya in the enforcement of environmental laws related cases this pollution.

This paper raised the formulation of the problem: (1) How is the effectiveness of the role of the Environment Institute Surabaya related pollution cases times surabaya by the waste processing on Gempolkerep factory according to Law No. 32 of 2009, and (2) What obstacles are in the natural Environment Institute Surabaya in Surabaya pollution case handling times by the Waste Management Manufacturing Gempolkerep for violation of Law No. 32 of 2009. In this study, researchers will use this type of juridical empirical research methods. This method is used by researchers to see, observe and analyze the object of investigation in view of the fact that there is in the corner of the field, not by reviewing rules or norms assess and compare between one rule to one another as was done in this type of research normative.

Environment Institute Surabaya share responsibility and the duty in the administrative law enforcement environment in accordance to Law No. 32 of 2009 Article 76 on the Protection and Environmental Management. The application of environmental law administration was run by the Environment Institute in Surabaya was run according to the procedure. It can be seen from the implementation of its own environmental control activities include prevention, mitigation, and restoration of the environment. However, in practice, the Environment Institute in Surabaya thought to be still firm and too lax in enforcing environmental law administrative sanctions.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	 10
A. Kajian Umum tentang lingkungan hidup .....	10
B. Penegakan Hukum Lingkungan .....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	17
2. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan.....	19
C. Badan Lingkungan Hidup .....	25
1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup .....	25
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.....	25
D. Kajian Umum tentang Pencemaran.....	26
E. Gambaran Umum PG. Gempolkrep .....	32
F. Kajian Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.....	34
G. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	47
G. Teknik Analisa Data .....	48
H. Sistematika Penulisan .....	48

I. Definisi Operasional .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep.....	52
2. History Penegakan Hukum Lingkungan pada Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gulaempolkerep .....	54
B. Pembahasan .....	56
1. Pelanggaran UUPPLH yang dilakukan PG. Gempolkrep .....	54
2. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	57
3. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Penanganan Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	65
4. Kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Kali Akibat Limbah Pengeolaan Pabrik Gula Gempolkerep.....	73
<b>SIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.3 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Alam merupakan pemenuh kebutuhan manusia dan diciptakan khusus untuk mendukung kehidupan manusia. Segala kebutuhan manusia berupa kekayaan tersedia di alam, manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa segala pendukung kehidupan manusia seperti makanan, bahan untuk tempat tinggal dan pakaian merupakan sumber daya alam yang tersedia di alam. Manusia sudah seharusnya melestarikan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring berjalannya waktu, fakta menunjukkan bahwa manusia menjajah dan mengambil keuntungan sumber daya alam itu untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan efek samping setelah melakukannya bagi orang lain.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960-1970), manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah bisa menaklukkan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata hanya suatu khayalan<sup>1</sup>. Commoner menyatakan bahwa kebergantungan kepada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingbergantungan antara manusia dan lingkungan untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia**, Bandung, 2015, Hal 8

ternyata dikuasi oleh hukum-hukum ekologi<sup>2</sup>. Kondisi ini menyadarkan manusia bahwa lingkungan merupakan suatu ekosistem, di mana manusia adalah salah satu unsurnya. Sebuah sistem akan terganggu apabila ada unsur yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Negara archipelago yang dipenuhi dengan begitu banyak sumber daya alam yang begitu elok nan menawan, baik di bidang pertanian, kelautan dan kehutanan. Negara Indonesia memiliki beragam sumber daya alam di laut seperti terumbu karang, rumput laut, ikan, udang, ganggang dan organisme lainnya. Seluruh organisme tersebut saling berinteraksi serta berhubungan antara satu dan lainnya, begitu juga dengan manusia yang turut memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam Indonesia.

Hal ini dibutuhkan adanya peran pemerintah untuk mengelola sumber daya itu sendiri. Peran pemerintah yang berperan dalam pelestarian lingkungan seperti dalam hal kebersihan lingkungan, pelarangan penembakan liar, larangan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, pelestarian hewan-hewan yang hampir punah dan juga kelestarian tumbuhan seperti penghijauan, penanaman hutan gundul dan lain sebagainya. Tanpa adanya peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam tersebut, maka akan mungkin terjadi kerusakan pada sumber daya alam dan tumbuhan dan hewan langka juga bisa punah.

Pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sumber Hukumnya adalah PP No. 27 tahun 2012

---

<sup>2</sup> Daud silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indoonesia**, Bandung, 2015, Hal 8

mengenai izin lingkungan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa segala kegiatan wajib memiliki izin perlindungan lingkungan hidup, dan UU tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada UU nomor 23 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum jelas dalam Bab X ayat (3) pasal 69 mengenai larangan melakukan pencemaran lingkungan hidup, memasukkan benda berbahaya dan beracun, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Aturan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Pasal 103 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kendati demikian, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap UU Nomor 23 tahun 2009 masih sangat minim, dapat di lihat dari tindakan pemerintah pusat maupun daerah/Kota yang begitu lambat dalam merampungkan permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik di Kota Surabaya Jawa Timur dan pembakaran hutan secara tidak bertanggungjawab yang terjadi di beberapa kota di indonesia serta pencemaran ekosistem laut yang kerap kali terjadi akibat limbah dari perusahaan-perusahaan tambang, padahal hal tersebut sepatutnya menjadi fokus utama pemerintah untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang di timbulkan sangat merugikan bagi kelangsungan kelestarian seluruh lingkungan hidup.



Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, lingkungan tersebut telah berubah menjadi suatu pemukiman padat penduduk. Manusia tidak peduli dan tidak memikirkan kelestarian lingkungan. Membuang sampah atau limbah rumah tangga sembarangan dan pabrik-pabrik membuang limbahnya ke sungai dan laut tanpa memikirkan dampaknya. Alam yang awalnya begitu indah dan menawan, berubah menjadi kotor dan penuh dengan bahan-bahan beracun. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terhadap kehidupan manusia terutama pada kesehatan.

Pengendalian akan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>3</sup> Setiap bagian-bagian pemerintahan memiliki porsi dan ruang lingkup yang berbeda antara satu dan yang lainnya, porsi-porsi tersebut di bagi sesuai dengan ranah kekuasaan dan tanggungjawab mereka.

Isu mengenai pencemaran lingkungan hidup sedang banyak dibahas di media. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang terdapat di bumi ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, serta segala sesuatu yang mempengaruhi alam dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain<sup>4</sup>. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan

---

<sup>3</sup> Djanius Djamin, **Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 23.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 23.

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Saat ini kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun telah memberikan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain yang ada di dunia. Kasus pencemaran lingkungan hidup seperti pembakaran hutan liar, pencemaran-pencemaran limbah pabrik, dan pencemaran zat-zat berbahaya yang tersebar di laut Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan penanggulangan yang tepat untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. dimana permasalahan pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi, diantaranya ada beberapa kasus yang sempat menjadi permasalahan hangat di kalangan masyarakat yaitu Peristiwa kematian ribuan ikan di sungai Surabaya yang kembali terjadi pada 13 November 2013 silam yang sepatutnya menjadi tugas utama pemerintah kota. Menurut Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), hal ini adalah salahsatu bentuk pelecehan yang dilakukan oleh pihak industri terhadap hukum dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Ecoton menyatakan bahwa, kasus kematian ikan itu disebabkan karena turunnya kadar oksigen dalam air, karena tingginya volume

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009

limbah yang dibuang ke sungai oleh industri yang ada di sepanjang sungai Surabaya.<sup>6</sup>

Pihak Ecoton menduga yang menjadi penyebab kejadian ini adalah beberapa pabrik atau industri di sepanjang sungai Surabaya. Beberapa diantaranya yang dicurigai adalah pabrik minyak, kertas, serta sabun detergen.

Pihak Ecoton telah mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya dan Perum Jasa Tirta, untuk melakukan penelusuran yang lebih mendetail untuk memantau kualitas air. Somasi yang dilakukan Ecoton pada 31 Oktober lalu yang tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah abai dan lalai terhadap upaya pengelolaan lingkungan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penegasan dari pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan menggugat secara hukum, dan justru hal ini diserahkan pada masyarakat<sup>7</sup>.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelanggaran atas UU Nomor 23 Tahun 2009 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Kali Surabaya oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gempolkerep”, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup semakin menipis, hal itu diperparah dengan peran pemerintah dan badan lingkungan hidup sebagai pengawas dan penegak hukum juga terlihat begitu minim, padahal dampak kerusakan lingkungan hidup begitu berbahaya efeknya bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk.

---

<sup>6</sup> Petrus Rizki, 15 November 2013, **Kematian Ribuan Ikan Sungai Surabaya Kembali Terjadi**, Tempo Hal 1

<sup>7</sup> Ibid., Hal 12

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.
2. Apa kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa sejauhmanakah efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis apasajakah faktor-faktor yang menjadi kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang keilmuan khususnya dalam ilmu hukum Administrasi Negara yang terkait dengan bidang Pemerintahan mengenai peran lembaga pemerintahan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

### **2. Secara Aplikatif**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat, khususnya kepada pelaku pelaku pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan akan kelestarian lingkungan hidup.

#### **b. Bagi Kalangan Akademisi**

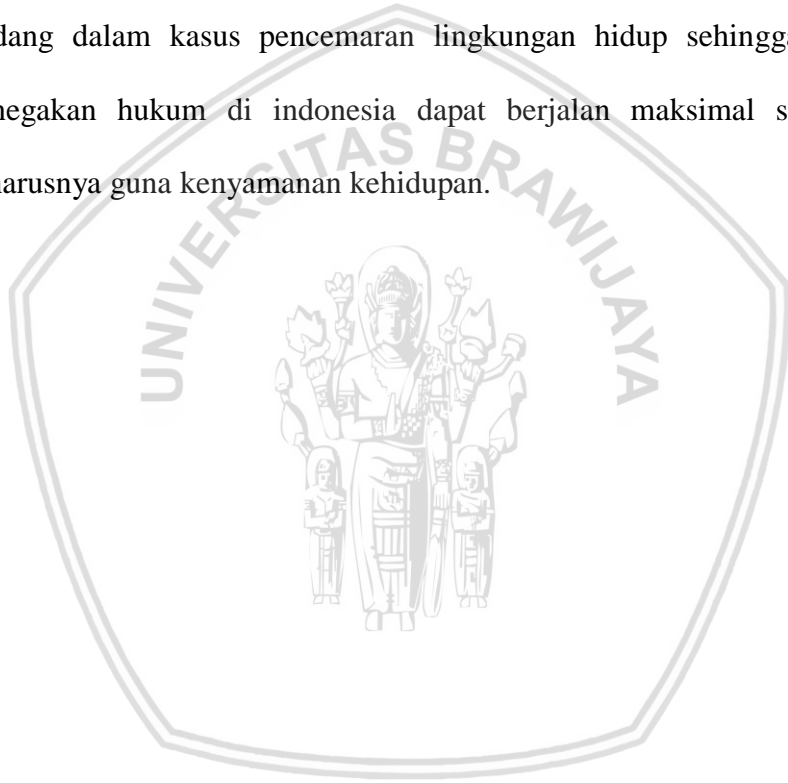
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan hukum administrasi negara serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dan penelitian hukum yang terkait dengan Peran lembaga pemerintahan akan penegakan Undang-Undang.

#### **c. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memberi masukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan peran lembaga pemerintahn terhadap penegakan Undang-undang sesuai dengan kajian hukum administrasi negara.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sekaligus evaluasi bagi penegak hukum khususnya pihak pemerintah terkait dalam melakukan proses pengawasan dan upaya penegakan hukum sesuai dengan undang-undang dalam kasus pencemaran lingkungan hidup sehingga penegakan-penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan maksimal sesuai dengan seharusnya guna kenyamanan kehidupan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan pengetahuan dasar mengenai makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi antara satu dan yang lainnya dengan lingkungan yang mereka tinggali. Manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup yang mereka tempati.<sup>8</sup> Dengan demikian lingkungan hidup adalah bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup menjadi kajian ilmu pengetahuan diawali dari seorang ahli biologi yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1860. Ernest Haeckel memperkenalkan istilah lingkungan hidup atau ekologi. Istilah *ekologi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Logos*. *Oikos* yang berarti rumah, sedangkan *Logos* yang berarti ilmu. Berawal dari konsep tentang ekologi yang diperkenalkan oleh Ernest Haeckel tersebut mendorong begitu banyak ahli untuk dapat lebih memperdalam konsep tentang lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Para pakar di bidang lingkungan tidak membedakan secara tegas pengertian antara “lingkungan” dengan “lingkungan hidup”, namun yang sering digunakan yaitu istilah “lingkungan” (*environment*) bermakna lebih luas dari pada istilah “lingkungan

---

<sup>8</sup> Fuaad Ansyari, **Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hal 20

<sup>9</sup> Bachrul Amiq, **Penerapan sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hlm 3



hidup” (*life environment*). beberapa pengertian lingkungan dari pakar lingkungan yaitu sebagai berikut.

1. **Salim** lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan yang mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
2. **Soedjono** lingkungan Hidup Sebagai Lingkungan hidup jasmani atau fisik yang meliputi dan mencakup segala macam unsur dan faktor fisik jasmaniah yang berada didalam alam semesta, maka hewan, tumbuh-tumbuhan serta manusia tersebut itu akan dianggap sebagai perwujudan secara fisik jasmani belaka
3. **Munadjat** Danusaputro lingkungan hidup adalah seluruh benda dan daya serta keadaan termasuk yang ada didalamnya manusia serta segala tingkah perbuatannya yang berada-beda dalam ruang dimana manusia itu berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta pada kesejahteraan manusia dan jasah hidup lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian pengertian lingkungan dan pengertian lingkungan hidup yang telah dikemukakan dapat di katakan bahwa antara “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam bentuk pengertian yang tidak berbeda atau sama. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 dimana pada penjelasan pasal I angka (1) yang menyebutkan bahwa :

“Lingkungan hidup yang terdapat disini merupakan suatu sistem yang mencakup lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi

---

<sup>10</sup> Ibid., Hlm. 5

kehidupan dan kesejahteraan seluruh manusia serta untuk makhluk hidup yang lainnya.”<sup>11</sup>

Adapun pengertian lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-undang No 23 pada tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta seluruh makhluk hidup yang lainnya.”<sup>12</sup>

Terdapat suatu hal yang perlu ditekankan dalam pengertian lingkungan hidup atau pengertian lingkungan tersebut bahwa antara suatu unsur dengan unsur lainnya berada dalam suatu lingkungan, merupakan sebuah kesatuan yang sama sekali tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan diantaranya saling mempengaruhi dan berpengaruh, terutama didalam hal kualitas lingkungan itu sendiri. Kendati demikian terdapat suatu kecenderungan yang begitu besar dalam mengadakan pembedaan antara lingkungan biologis, lingkungan sosial dan lingkungan fisik.<sup>13</sup>

Pengertian mengenai lingkungan terbagi atas 3 kelompok dasar yang dimaksudkan dapat memudahkan dalam menjelaskan pengertian akan lingkungan itu<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Daud silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya** Di Indonesia, Bandung, 2015, hlm13

<sup>12</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 12

<sup>13</sup> Ibid., hlm 12

<sup>14</sup> Amsyari, 2013, Lingkungan Hidup (online),  
<file:///C:/Users/USER/Desktop/Pengertian%20Lingkungan%20Menurut%20Para%20Ahli%20%20Pengertian%20-%20Pengertian.htm>, (21 Februari 2016)

1. Lingkungan fisik atau *physical environment*

Segala sesuatu yang terdapat disekitar manusia dimana terbentuk dari benda mati semisal gunung, kendaraan, udara, air, rumah dan lain-lain.

2. Lingkungan biologis atau *biological environtment*

Segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup selain yang taerdatap pada diri manusianya itu sendiri seperti binatang-binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar serta tumbuh-tumbuhan dari yang paling kecil sampai yang terbesar

3. Lingkungan sosial atau *social environtment*

Manusia-manusia yang lain yang berada disekitarnya seperti teman-teman, tetangga-tetangga, serta orang-orang yang lain yang belum dikenal.

Kendati demikian, baik lingkungan sosial maupun lingkungan biologis dan lingkungan fisik selalu akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Agar lingkungan tersebut bisa dipertahankan dengan baik kehidupannya dengan secara serasi maka manusia perlu melakukan penyesuaian diri atau melakukan proses adaptasi yang maksimal terhadap adanya seluruh perubahan-perubahan tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan untuk sifat-sifat dari lingkungan hidup itu sendiri ditentukan oleh berbagai macam faktor-faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut yaitu<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Muhammad Erwin, **Hukum Lingkungan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 22

<sup>16</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 23

1. Jenis dan jumlah yang terdapat pada masing-masing jenis di unsur lingkungan hidup tersebut.
2. Interaksi atau hubungan di antara setiap unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan hidup.
3. Kondisi nyata atau kelakuan yang terdapat pada unsur lingkungan hidup; dan
4. Faktor non material seperti kebisingan lingkungan , temperatur suhu dan cahaya.

Adanya perubahan-perubahan pada lingkungan yang dimaksudkan disini tentu terdapat menyebabkan perubahan kualitas, yakni sehat atau tidaknya suatu lingan atau baik buruknya suatu lingkungan.

Lingkungan terbagi atas dua yaitu lingkungan *ABiotik* dan lingkungan *Biotik*:

1. Komponen abiotik atau komponen benda mati semisal tanah, energi, udara dan air.
2. Komponen biotik atau makhluk hidup semisal tumbuh-tumbuhan, mikroba dan binatang.

Berdasarkan dari segi nutrisi atau *trofik*, maka komponen biotik didalam ekosistem tersebut terdiri atas dua jenis yaitu :

1. Komponen *autotrofik*

Kata *autotrofik* itu berasal dari sebuah kata *autos* yang bermakna sendiri dan *trophikos* yang bermakna menyediakan makanan. Komponen *autotrofik* yakni seluruh organisme yang dapat menyediakan atau dapat mensintesis makanannya secara sendiri berupa bahan organik yang bersumber dari bahan-bahan anorganik dengan adanya bantuan *klorofil* dan energi utama yang berupa adanya radiasi sinar matahari. Oleh sebab itu, organisme yang mengandung berupa *klorofil* itu

termasuk dalam suatu golongan *autotrof* dan pada umumnya ialah golongan tumbuh-tumbuhan. Pada komponen *nutrofik* akan terjadi suatu pengikatan energi radiasi matahari dan bersintesis pada bahan *anorganik* yang menjadi sebuah bahan organik yang kompleks.<sup>17</sup>

## 2. Komponen *heterotrofik*

Kata *heterotroik* itu berasal dari kata *hetero* yang bermaknai berbeda organisme yang hidupnya memanfaatkan bahan organisik untuk di jadikan bahan makanannya, sedangkan pada bahan organik yang sudah dimanfaatkan tersebut telah disediakan oleh organisme yang lainnya. Jadi, komponen *heterotrofit* akan memperoleh bahan makanan yang bersumber dari beberapa komponen *autotrofik*, kemudian pada sebagian anggota komponen tersebut akan menguraikan bahan organik komplek ke dalam bentuk bahan anorganik yang secara sederhana dengan demikian maka jamur, jasad renik,binatang termasuk dalam golongan komponen heterotrofik.<sup>18</sup>

Usaha atau berbagai macam aktivitas yang diperkirakan dapat memiliki dampak yang sangat penting terhadap perkembangan dari lingkungan yaitu<sup>19</sup>:

1. Adanya pengubahan yang terjadi pada bentang alam dan bentuk lahan.
2. Adanya eksploitasi yang terjadi pada sumber daya alam baik itu sumber daya alam yang telah terbaharui maupun sumber daya alam yang tidak lagi dapat terbaharui

---

<sup>17</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 23

<sup>18</sup> Ibid., hlm 24

<sup>19</sup> **Pasal 1 ayat 1 pada PIP no. 51 Tahun 1993**

3. Proses dan adanya kegiatan yang secara potensial dapat memunculkan pemborosan, dan suatu kerusakan dan terjadinya kemerosotan pada sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Suatu proses dan aktivitas yang dampaknya bisa mempengaruhi lingkungan budaya.
5. Proses dan adanya kegiatan yang dampaknya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi pada sumber daya alam dan/atau pada perlindungan cagar budaya.
6. Terjadinya proses *introduksi* yang terjadi pada segala jenis tumbuh - tumbuhan, serta jasad renik dan berbagai macam jenis-jenis hewan yang ada.
7. Pembuatan dan adanya penggunaan bahan-bahan hayati dan non hayati,
8. Adanya penerapan teknologi yang telah diperkirakan dapat menimbulkan suatu potensi yang besar yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup,
9. Aktivitas yang memiliki resiko tinggi dan dapat mempengaruhi segala macam bentuk-bentuk pertahanan negara.

Sedangkan, untuk dampak penting yang akan atau kemungkinan terjadi pada suatu usaha atau aktivitas terhadap lingkungan hidup tersebut di tentukan oleh beberapa faktor-faktor<sup>20</sup>:

1. Luas wilayah yang ada pada persebaran dampak dari aktivitas tersebut,
2. Jumlah dari manusia yang telah terkena akan dampak dari aktivitas tersebut,
3. Lamanya waktu akan dampak dari aktivitas terhadap lingkungan hidup tersebut akan berlangsung,

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat 1 PP. No. 51 pada tahun 1993



4. Intensitas terhadap dampak akibat dari aktivitas terhadap lingkungan hidup,
5. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang telah terkena dampak dari aktivitas tersebut,
6. Tidak berbalik atau berbaliknya dampak akan aktivitas lingkungan hidup.

## **B. Penegakan Hukum Lingkungan**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>21</sup>. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Makna penegakan hukum (*law enforcement*) secara khusus adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>22</sup>. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan atau undang-undang yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan dan sanksi yang dapat

---

<sup>21</sup> Jimly, Asshiddiqie, "*Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" (dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006)

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Bam, Bandung.



dikenakan terhadap para pelangganya yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penegakan peraturan atau undang-undang yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian penegakan hukum seringkali disalah artikan kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dilakukan dengan paksaan (*force*) sehingga cenderung membawa kita dalam opini bahwa penegakan hukum selalu bersifat represif saja atau ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana saja. Padahal penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif. Begitu pula dalam penegakan hukum lingkungan, dimana penegakan hukum meliputi segala segi baik yang bersifat preventif maupun represif.

Penegakan hukum lingkungan meliputi kemampuan petugas penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum lingkungan yang berlaku (*ius constitutum*) dalam pelaksanaannya di lapangan (*ius operatum*). Penegakan hukum lingkungan meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidana terkait kerusakan/pencemaran lingkungan. Upaya penyelamatan lingkungan yang asri tergantung pada kesadaran bersama, baik pemerintah, pengusaha dan dunia usaha maupun masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungan hijau sebagai warisan dan titipan kepada generasi selanjutnya.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan

perizinan. Selanjutnya, dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi<sup>23</sup>.

## **2. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan**

Bentuk penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dalam tiga bentuk, antara lain sebagai berikut.

### **a. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Administrasi**

Penegakan hukum lingkungan dalam hukum administrasi menjadi prioritas dalam penegakan hukum lingkungan. Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi berpijak pada beberapa alasan utama antara lain sebagai berikut.

- 1) Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
- 2) Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
- 3) Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).
- 4) Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.
- 5) Sebagai sarana penecagahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.

---

<sup>23</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup:Jakarta,2009), halaman 20.

- 6) Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpukan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata<sup>24</sup>.

Penegakan hukum administrasi merupakan upaya pertama dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau jika antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan jenisnya ada beberapa jenis sanksi administratif yaitu :

- 1) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila

---

<sup>24</sup> Loc.cit

masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

- 2) Penarikan kembali keputusan dan/atau ketetapan yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi dan lain-lain).

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan dan/atau ketetapan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau diartik kembali (izin, subsidi berkala)<sup>25</sup>.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran<sup>26</sup>.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pengawasan terhadap pelaku kegiatan dalam pemberian izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 71, 72, 73, 74 dan 75 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemaran yang diatur dalam pasal 76 sampai pasal 83 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Dalam prakteknya,

---

<sup>25</sup> **Loc.cit**

<sup>26</sup> Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 48

penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif dimulai dari proses perizinan. Sebelum memperoleh izin, setiap kegiatan usaha wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Di dalam izin tercantum rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti syarat mutu limbah yang dapat dibuang dan sebagainya. Pejabat penerbit izin sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang serta berkaitan dengan usaha tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan pemberian izin tersebut wajib diumumkan sehingga memungkinkan peran masyarakat yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin<sup>27</sup>.

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pemberian sanksi yang berbeda-beda itu disebabkan karena bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya jika ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penjatuan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.

---

<sup>27</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2009), halaman 20

### **b. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Perdata**

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan<sup>28</sup>.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 proses penegakan hukum Lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII penyelesaian sengketa lingkungan pasal 84 sampai dengan pasal 93. Dalam ketentuan tersebut penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa<sup>29</sup>.

### **c. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Pidana**

Penegakan hukum dari sisi hukum pidana meliputi 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Berikut disajikan penjelasan kedua fungsi tersebut.

#### **1) Fungsi Umum**

Oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

---

<sup>28</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2009),

<sup>29</sup> **Undang-undang nomor 32 tahun 2009**



umumnya, ialah mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

## 2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yakni opsi terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

Lebih lanjut, tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP bertujuan sebagai berikut.

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penegakan hukum lingkungan dari sisi hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Bab XIV Tentang Penyidikan dan



Pembuktian yang masing-masing dijelaskan pada Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Selain itu diatur dalam Bab XV Tentang Ketentuan Pidana<sup>30</sup>.

## **C. Badan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup**

Peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sangatlah penting adanya, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegak sanksi administrasi dari penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui penegakan sanksi administrasinya. Pengawasan dan penegakan sanksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan. Sementara itu badan yang ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi lingkungan hidup disebut Badan Lingkungan Hidup.

### **2. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya beralamat di jalan Jimerto no 25-27, Surabaya.

---

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2009

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota memiliki visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan lima tahunan. Sejalan dengan visi pemerintah kota Surabaya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan di masa yang akan datang, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan visi yaitu menjadi badan lingkungan hidup yang handal, proaktif, dan partisipasif.

Selanjutnya, untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan misi antara lain sebagai berikut.

- 1) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang handal melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan serta sarana dan pra sarana;
- 2) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang proaktif melalui peningkatan pelayanan terhadap perizinan dan permasalahan lingkungan; dan
- 3) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang partisipasif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
- 4) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Kajian Umum tentang Pencemaran**

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan seharusnya lingkungan itu berfungsi<sup>31</sup>.

Peristiwa pencemaran lingkungan disebut juga polusi. Zat atau bahan-bahan yang nantinya bahan tersebut akan dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat dimana suatu zat dapat disebut polutan adalah apabila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup<sup>32</sup>. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak

Suatu zat dapat disebut polutan apabila<sup>33</sup>:

- 1 Jumlahnya melebihi jumlah normal.
- 2 Berada pada waktu yang tidak tepat
- 3 Berada pada tempat yang tidak tepat

---

<sup>31</sup> **Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982**

<sup>32</sup> Tresna Sasrawijaya, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal 12

<sup>33</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 8

Sifat polutan adalah :

- 1 Merusak untuk sementara waktu, tetapi bila benda tersebut telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi<sup>34</sup>.
- 2 Dapat menyebabkan kerusakan yang nantinya akan berdampak pada lingkungan serta akan dapat menyebabkan kerusakan dalam jangka waktu / kurun waktu yang cukup lama atau bahkan sangat lama.<sup>35</sup>

Menurut dari tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.

1. Pencemaran udara

Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut:

- a. Partikel SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Kedua partikel ini bersama dengan partikel-partikel cair membentuk embun, lalu membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan makhluk hidup. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan<sup>36</sup>
- b. Batu bara yang mengandung zat sulfur melalui proses pembakaran akan menghasilkan zat sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama-sama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini dapat membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan gangguan yang cukup

---

<sup>34</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 10

<sup>35</sup> Dantje T. Sembel., loc.cit

<sup>36</sup> Kidd, Dkk, **Pencemaran Udara Masalah dan Penyelesaian**, Renee, Sarawak, 2012, Hal 12

berbahaya pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan (ispa), perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih<sup>37</sup>.

Sumber polusi udara yang lain dapat pula berasal dari radiasi-radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam lapisan atmosfer dan jatuh di bumi. Materi radioaktif ini nantinya akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek dari pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

## 2. Pencemaran air

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai yakni berikut:

- a. Pembuangan sisa limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik yang berbahaya, misalnya, sisa detergen mencemari air.
- b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O<sub>2</sub> di air dapat berkurang dari kadar yang seharusnya, sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air,
- c. Fosfat hasil pembusukan bersama H<sub>2</sub>O dan pupuk pertanian terakumulasi dan kemudian menyebabkan *eutrofikasi*, yaitu penimbunan zat mineral yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang begitu cepat pada alga

---

<sup>37</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 12

(*Blooming alga*). Akibatnya, tanaman-tanaman di dalam air tidak lagi dapat berfotosintesis seperti seharusnya karena sinar matahari terhalang.<sup>38</sup>

Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan dari minyak bumi, yang berasal dari kecelakaan kapal tanker minyak yang seringkali terjadi. Banyak organisme akuatik yang akan mati atau keracunan karenanya sehingga merusak lingkungan hidup akuatik. Untuk dapat membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Bila terlambat penanganannya, kerugian yang akan di hadapi manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut<sup>39</sup>. Bila telah terjadi pencemaran di air, maka dampaknya akan terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini akan semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

### 3. Pencemaran tanah

Penyebab pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran yaitu :

- a. Sampah-sampah plastik yang sukar untuk dapat di hancurkan oleh tanah seperti botol-botol, karet-karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng.
- b. Detergen yang bersifat non *bio degradable*<sup>40</sup>.
- c. Zat kimia yang bersumber dari buangan pertanian, misalnya insektisida.

---

<sup>38</sup> Fuaad Ansyari, **Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hal 15

<sup>39</sup> Ibid., Hal 16

<sup>40</sup> Ibid., Hal 20

#### 4. Pencemaran suara

Polusi suara disebabkan oleh beberapa hal yaitu oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio/tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran.

Menurut macam-macam bahan yang dapat menyebabkan pencemar dapat di golongankan sebagai berikut:

##### 1. Kimiawi

Berupa zat-zat dengan kadar radio aktif, seperti macam logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, pestisida, detergen dan minyak.

##### 2. Biologi

Berupa unsur-unsur yang memiliki mikroorganisme, misalnya *Escherichia coli*, *Entamoeba coli*, dan *Salmonella typhosa*.

##### 3. Fisik

Berupa bermacam-macam barang yang tidak dapat terurai oleh tanah seperti kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet.<sup>41</sup>

Menurut WHO, tingkat pencemaran dapat didasarkan pada kadar zat-zat pencemar dan juga oleh waktu (lamanya) kontak. Tingkat pencemaran itu dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan<sup>42</sup>, yaitu sebagai berikut.

1. Pencemaran mengakibatkan iritasi atau gangguan yang terjadi pada organ-organ panca indra dan tubuh makhluk hidup serta telah menimbulkan kerusakan pada

---

<sup>41</sup> Rukaesih Achmad, **Kimia Lingkungan**, Andi, Yogyakarta, 2011, Hal 18

<sup>42</sup> Ibid., Hal 20



ekosistem-ekosistem yang lain. Misalnya gas buangan dari kendaraan bermotor yang menyebabkan mata menjadi pedih.

2. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis dan berbahaya. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) di kota Minamata Jepang yang menyebabkan masyarakat terjangkit kanker dan lahirnya bayi cacat.
3. Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga dapat menimbulkan gangguan dan sakit atau hingga kematian dalam lingkungan.

#### **E. Gambaran Umum PG. Gempolkrep**

PG. Gempolkrep adalah anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X). PG. Gempolkrep juga merupakan salah satu dari 11 unit industri gula milik PTPN X yang berada di Jawa Timur, bersama dengan Pabrik Gula (PG) lainnya, yaitu PG Kremboong, PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Djombang Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo dan PG Modjopanggoong.

PTPN X sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.15 Tanggal 14 Februari Tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara dari PT Perkebunan (Eks.PTP 19, Eks.PTP 21-22 dan Eks.PTP 27) yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dan tertuang dalam akte Notaris Harun Kamil, SH No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang mengalami Perubahan kembali sesuai Akte Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH. No. 1 tanggal 2 Desember 2011.

PG. Gempolkrep sendiri sebagai unit industry gula dibawah naungan PTPN X memiliki visi dan misi yang jelas. Adapun visi dari PG. Gempolkrep yaitu menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, misi dari PG. Gempolkrep adalah sebagai berikut.

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan.
2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama team serta organisasi yang profesional.

Adapun, filosofi adalah PG. Gempolkrep adalah menjalankan misi perusahaan memerlukan acuan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sebagai arahan untuk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh integritas, peraturan atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan oleh semua tingkat karyawan, dengan mengikuti aturan yang ada akan memberikan pencapaian prestasi yang merupakan visi perusahaan. Pokok arahan juga disebutkan dalam Company Business Philosophy meliputi: “Integritas, Profesionalisme, Visioner, dan Sinergi.” Dalam produktifitas karyawan di tempat kerja harus tetap tinggi dan budaya kerja harus dipahami dan dilaksanakan, adalah: profesional, produktif, dan pembelajar. Memberikan pelayanan cepat, efektif dan efisien kepada seluruh unit usaha dan atau anak perusahaan PTPN X dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya dan peningkatan mutu kinerja

yang berdaya saing tinggi demi kepuasan pelanggan, stakeholder dan shareholder. Mendorong terwujudnya Efisiensi, Disversifikasi dan Optimalisasi dalam upaya meningkatkan daya saing dan sustainability dengan tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan<sup>43</sup>.

#### **F. Kajian Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) telah menggantikan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH terdapat kewenangan pemerintah terhadap penetapan sanksi administratif dan di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif bagi pelanggarnya.

Penegakan aturan hukum lingkungan administratif yang berupa pengawasan serta penerapan akan sanksi administrasi dalam UUPPLH telah di atur dengan sangat jelas dalam Bab XII bagian kedua yang meliputi Pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH yaitu :

##### **Pasal 76**

- (1) Menteri, Gubernur atau bupati/walikota berkewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatannya jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

---

<sup>43</sup> Company Profile PG. Gempolkrep

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan terhadap izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan terhadap izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana telah di atur di dalam pasal tersebut merupakan kewenangan dan kekuasaan yang di miliki oleh pejabat administrasi. Apabila kewenangan tersebut tidak di gunakan atau tidak di laksanakan oleh pejabat daerah maka penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pemerintah Pusat. Aturan tersebut dengan sangat jelas di atur dalam pasal UUPPLH yang menyatakan:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selain dari hal tersebut, bagi perusahaan selaku badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang mengakibatkan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, dapat di jatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Pembekuan atau pencabutan izin di lakukan jika pengusaha atau penaggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk administrasi sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang sebelumnya telah di jatuhkan. Hal ini tertuang dalam pasal 29 UUPPLH yang menyatakan:

“Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76 ayat

(2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.”

Dalam Undang-undang dan juga teori telah di tegaskan bahwa pejabat administrasi berkewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah (*bestuur dwang*). Demikian pula dalam penegakan hukum lingkungan, para pejabat administrasi diberikan kewenangan untuk dapat menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintah. Menurut pasal 80 UUPPLH bentuk-bentuk paksaan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pemindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi dapat menimbulkan pelanggaran;
  - f. Penghentian untuk sementara waktu seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk dapat menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (2) Pengenaan paksaan dapat di jatuhkan tanpa di dahului teguran apabila pelanggaran yang di lakukan dapat menimbulkan:
  - a. Ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. Dampak yang besar dan luas jika tidak segera dihentikan; dan/atau

- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera di hentikan.

### **G. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009**

Peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sangatlah penting adanya, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegak sanksi administrasi dari penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui penegakan sanksi administrasinya. Pengawasan dan penegakan sanksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dicantumkan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini mencakup pula tugas dan kewajiban Badan Lingkungan Hidup selaku unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun peran badan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni pada Bab IX Pasal 63-64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor

---

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8

32 Tahun 2009 Bab IX Pasal 63-64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut.

### **Pasal 63**

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;



- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;

- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 64**

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP (Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : SYANDI AFRIANSYAH**

**b. NIM : 115010107111040**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian : 7 Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 10 Agustus 2016**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. ....**

**Agus Yulianto, SH., MH  
NIP. ....**

**Mengetahui  
Kepala Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

**Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. ....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN  
HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH  
LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP  
(Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya)**

**Oleh**  
**SYANDI AFRIANSYAH**  
**115010107111040**

Skripsi ini Telah Di Sahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH., MH  
NIP. 195907171986011001

Mengetahui

Kepala Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Dekan  
Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH., MHum  
NIP. 196008101986011002

Dr. Rahmat Syafa'at, SH., M.Si  
NIP. 1962080511988021001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	 10
A. Kajian Umum tentang lingkungan hidup .....	10
B. Penegakan Hukum Lingkungan .....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	17
2. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan.....	19
C. Badan Lingkungan Hidup .....	25
1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup .....	25
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.....	25
D. Kajian Umum tentang Pencemaran.....	26
E. Gambaran Umum PG. Gempolkrep .....	32
F. Kajian Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.....	34
G. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	47
G. Teknik Analisa Data .....	48



H. Sistematika Penulisan .....	48
I. Definisi Operasional .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep.....	52
2. History Penegakan Hukum Lingkungan pada Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep .....	54
B. Pembahasan .....	56
1. Pelanggaran UUPPLH yang dilakukan PG Gempolkrep .....	54
2. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	57
3. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Penanganan Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	65
4. Kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep.....	73
<b>SIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.3 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009



## RINGKASAN

Syandi Afriansyah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH LIMBAH PENGELOLAAN PABRIK GEMPOLKEREP** (Studi Kasus Pada badan lingkungan hidup Kota Surabaya), Lutfi Effendi, SH., Mhum., Agus Yulianto, SH., MH.

Penulis mengangkat permasalahan tentang penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup terkait kasus pencemaran kali Surabaya oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gempolkerep. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya kasus pencemaran sungai Surabaya oleh Limbah Pabrik Gula Gempolkerep yang menyebabkan matinya ratusan ikan dan rusaknya ekosistem sungai di Surabaya. Kasus pencemaran ini merupakan kasus kedua yang dilakukan oleh pihak Pabrik Gula Gempolkerep. Dari kasus ini, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Surabaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup terkait kasus pencemaran ini.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, dan (2) Apa kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarena peneliti akan melihat, mengamati dan menganalisis obyek penelitian yang di lihat dari sudut kenyataannya yang terdapat di lapangan, bukan dengan mengkaji peraturan-peraturan atau mengkaji norma-norma dan membandingkannya antara satu peraturan satu dengan yang lainnya seperti halnya yang dilakukan dalam jenis penelitian normatif.

Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya turut bertanggungjawab serta berkewajiban dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 76 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan hukum lingkungan administrasi sudah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya kegiatan pengendalian lingkungan sendiri mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya dianggap masih belum tegas dan terlalu longgar dalam menegakkan sanksi hukum lingkungan administrasi.

## SUMMARY

Syandi Afriansyah, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in August 2016, ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT BY THE ENVIRONMENT LAW INSTITUTE IN RELATED CASE OF POLLUTION IN SURABAYA RIVER BY WASTE PROCESSING OF GEMPOLKEREP FACTORY (Case Study ON Environmental Institute Surabaya), Lutfi Effendi, SH., Mhum ., Agus Yulianto, SH., MH.

The authors raise concerns about environmental enforcement by the Environment Institute regarding the case of contamination of times Surabaya by Waste Management Manufacturing Gempolkerep. Selection of these themes to a backdrop of Surabaya river pollution case by Sugar Factory Waste Gempolkerep which caused the death of hundreds of fish and damage the river ecosystem in Surabaya. This pollution case is the second conducted by the Sugar Factory Gempolkerep. Of these cases, researchers are interested in examining how the role of the Environment Agency Surabaya in the enforcement of environmental laws related cases this pollution.

This paper raised the formulation of the problem: (1) How is the effectiveness of the role of the Environment Institute Surabaya related pollution cases times surabaya by the waste processing on Gempolkerep factory according to Law No. 32 of 2009, and (2) What obstacles are in the natural Environment Institute Surabaya in Surabaya pollution case handling times by the Waste Management Manufacturing Gempolkerep for violation of Law No. 32 of 2009. In this study, researchers will use this type of juridical empirical research methods. This method is used by researchers to see, observe and analyze the object of investigation in view of the fact that there is in the corner of the field, not by reviewing rules or norms assess and compare between one rule to one another as was done in this type of research normative.

Environment Institute Surabaya share responsibility and the duty in the administrative law enforcement environment in accordance to Law No. 32 of 2009 Article 76 on the Protection and Environmental Management. The application of environmental law administration was run by the Environment Institute in Surabaya was run according to the procedure. It can be seen from the implementation of its own environmental control activities include prevention, mitigation, and restoration of the environment. However, in practice, the Environment Institute in Surabaya thought to be still firm and too lax in enforcing environmental law administrative sanctions.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Kajian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

##### Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

##### Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

### Bagian Kesatu

#### Inventarisasi Lingkungan Hidup

##### Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
  - a. tingkat nasional;
  - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Wilayah Ekoregion

##### Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Penetapan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
- karakteristik bentang alam;
  - daerah aliran sungai;
  - iklim;
  - flora dan fauna;
  - sosial budaya;
  - ekonomi;
  - kelembagaan masyarakat; dan
  - hasil inventarisasi lingkungan hidup.

#### Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

#### Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 9

- RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - RPPLH nasional;
  - RPPLH provinsi; dan
  - RPPLH kabupaten/kota.
- RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
  - RPPLH nasional;
  - inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- RPPLH provinsi;
  - inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - inventarisasi tingkat ekoregion.

#### Pasal 10

- RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - sebaran penduduk;
  - sebaran potensi sumber daya alam;
  - kearifan lokal;
  - aspirasi masyarakat; dan
  - perubahan iklim.
- RPPLH diatur dengan:
  - peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
  - peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
  - peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- RPPLH memuat rencana tentang:
  - pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IV PEMANFAATAN

#### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

b. gubernur . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
  - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

## BAB V PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## Bagian Kedua Pencegahan

### Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

### Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

(2) Apabila . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

#### Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Tata Ruang

#### Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Paragraf 3

#### Baku Mutu Lingkungan Hidup

#### Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2) Baku mutu . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

#### Paragraf 4

#### Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan gambut;
  - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

#### Paragraf 5

#### Amdal

#### Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
  - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

#### Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

#### Pasal 28

- (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
  - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
  - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 29

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. instansi lingkungan hidup;
  - b. instansi teknis terkait;
  - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
  - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 6

#### UKL-UPL

#### Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

#### Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

#### Paragraf 7

#### Perizinan

#### Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 9

#### Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Paragraf 10

#### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

#### Paragraf 11

##### Analisis Risiko Lingkungan Hidup

#### Pasal 47

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 12

##### Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 49

- (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
  - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

#### Pasal 50

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

#### Pasal 51

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

(3) Kriteria . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
  - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
  - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
  - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Pemulihan

##### Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

#### Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VI PEMELIHARAAN

#### Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII

### PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

##### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

### Bagian Ketiga Dumping

#### Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

#### Pasal 61

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 63

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan nasional;
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
  - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
  - g. mengembangkan standar kerja sama;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

u. mengelola . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

i. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

### BAB X

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

## BAB XI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

## BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

#### Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

#### Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

## Bagian Kedua Sanksi Administratif

### Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

### Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

#### Pasal 80

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

#### Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII

## PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

#### Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

##### Paragraf 1

##### Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

##### Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

## Paragraf 2

### Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Paragraf 3

### Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

#### Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

## Paragraf 4

### Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

#### Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 5

#### Hak Gugat Masyarakat

##### Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

##### Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

#### Paragraf 7

#### Gugatan Administratif

#### Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

## BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

### Bagian Kesatu Penyidikan

#### Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
  - (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
  - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

#### Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pembuktian

#### Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

#### Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

#### Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

#### Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

#### Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 122

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

#### Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

#### Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

#### Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersedian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
  - c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
  - d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
  - f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
  - g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
  - h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
  - j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
  - k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat  
yang diakui oleh DPRD.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 39

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pasal 47 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

- a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
- b. temuan audit;
- c. kesimpulan audit; dan
- d. data dan informasi pendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 58

Ayat (1)  
Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 59

Ayat (1)  
Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Ayat (1)  
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain,  
DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c  
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang  
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d  
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius”  
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat  
membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak  
orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Ayat (1)  
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Ayat (1)  
Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)  
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 113

Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121 . . .







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

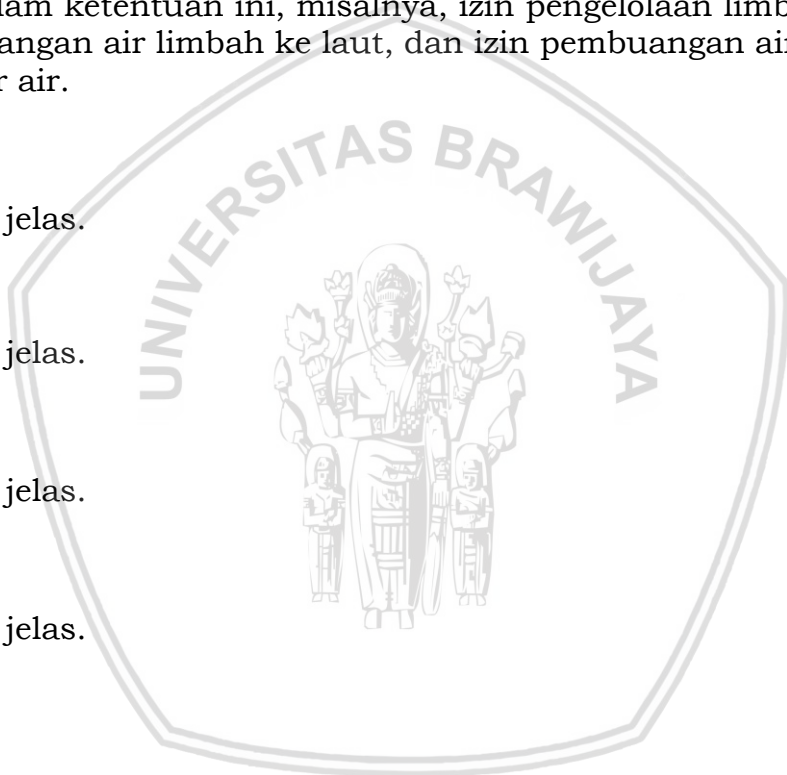
Pasal 123  
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Kali Surabaya Oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempol Kerep”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT

Malang, 4 Juni 2016

Penulis,

Syandi Afriansah

## UCAPAN TERIMA KASIH

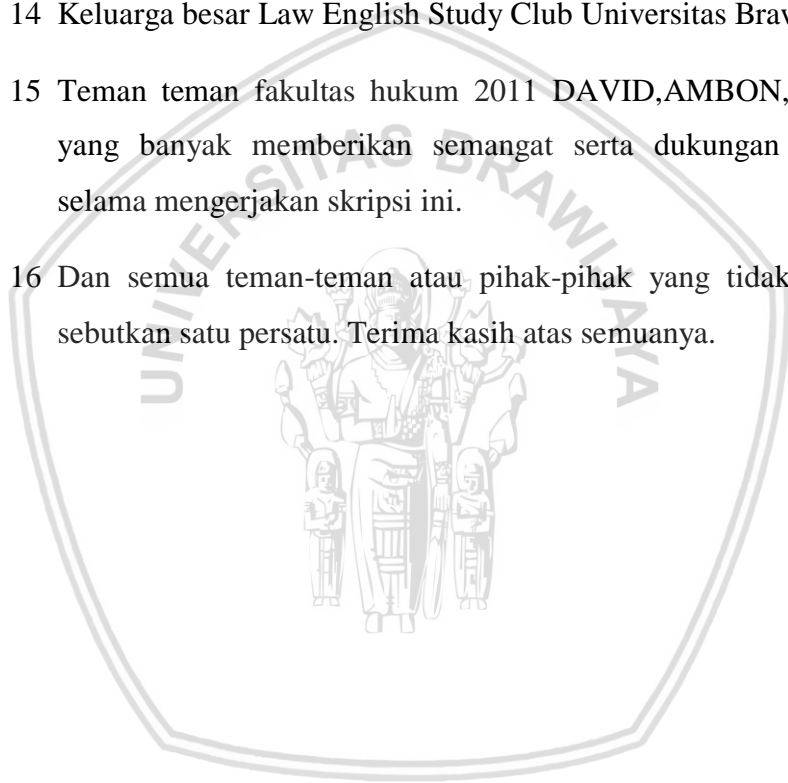
Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Mama dan Papa tercinta NYONYA WISMARIATY NAZAR dan BAPAK SYAFRIZAL ALI yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga, dan sebagai pasangan orangtua yang sangat amat luarbiasa hebat yang ada di dunia, dan juga orangtua yang sungguh luarbiasa buatku yang tidakpernah menunjukkan keluhannya dan kekecewaannya kepada kedua anak-anak nakalnya terutama saya walaupun sering di mintain jajan di saat-saat gak tepat dan sering dibohongin bahkan ketahuan.
2. Kakakku yang sangat ku cinta SYASTI WINDIASARY yang juga begitu banyak memacu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan omelan-omelan pedasnya yang selalu ada di setiap malam lewat telfon dan segala bantuan-bantuan dana dan pinjaman-pinjaman danaya yang sangat membantu untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Etek-etek dan Om tercinta yang sudah aku anggap sama persis seperti Mama dan papa kandungku sendiri ADE IRMA LINDA NAZAR, EFDHAL NAZAR, MAIMUNAH. Kalian sungguh om dan etek-etek yang sangat luarbiasa yang bersikap sama/bahkan terkadang lebih dari mama-papa kepada aku dalam memantau, memarahi, mengomeli dan menyayangiku setra mendukungku. Terutama buat TEK ADE yang paling ku sayangi “ Jangan was-was dan takut lagi ya tek sama kuliah dan masadepan dedek, ini dedek udah selesaikok skripsinya,

- selanjutnya bakal LULUS percaya lah tek “Etek Tanggungjawab Dedek. **Aku Anakmu**” jangan pernah nangis lagi “
- 4 Wanita bawel PUTRI SRI KASINTA yang selalu setia untuk tiada bersama, tapi setiap di telfon pasti selalu ingat dan yang pertamakali di tanyain “gimana skripsimu pin”, “sudah sampai mana pin”, “apa yang sulit atau gak bisa? Sini kirim email biar ku bantuin, biar kamu cepat lulus , biar bisa punya usaha”, “ kapan Kompre?yudisium?wisuda bla..bla..bla.. “. Trimakasih banyak buat semuanya ya put , aku doakan segalamacam yang terbaik buatmu nantinya AMIN.
  - 5 Teman-Teman/saudara-saudara seperjuangan PMP 2011 UCOK,AMIK,CINA,DANIL,KACONG,GENDUT RIRIN, DLL, kalian sangat berjasa selama ini buat ku, tanpa kalian aku juga gak akan bisa sampai ke tahap ini.
  - 6 Adik-adik PMP 2012,13,14,15 yang juga berjasa buat kuliah,hidup dan terselesaikannya skripsi ini walau kadang lebih seringnya dengan kata-kata gak enak “ Bang kapan lulus, ntar aku duluan loh “
  - 7 Bapak Dr.Rachmad Safa’at, SH, M Si, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
  - 8 Bapak Lutfi Effendi SH,Mhum selaku kepala program studi Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk,dorongan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
  - 9 Bapak Agus Yulianto, SH, MH selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan petunjuk,dorongan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
  - 10 Bapak Haru Permadi, SH,MH selaku dosen konsentrasi Hukum Administrasi Negara khususnya bidang ilmu hukum lingkungan yang

begitu banyak membantu, dan memberikan dukungan serta semangat, dan banyak waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

- 11 Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 12 Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 13 Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya
- 14 Keluarga besar Law English Study Club Universitas Brawijaya
- 15 Teman teman fakultas hukum 2011 DAVID, AMBON, ADAN DLL, yang banyak memberikan semangat serta dukungan kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
- 16 Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syandi Afriansyah

NIM : 115010107111040

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain yang telah di publikasikan. Juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkangelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang di acu dalam kutipan di daftar pustaka .

Demikian surat pernyataan ini saya buat , jika dikemudian hari ternukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang telah di publikasikan maupun dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia di cabut gelar kesarjanaannya.

Malang, 16 November 2016

Yang dinyatakan ,

Syandi Afriansyah

NIM.115010107111040



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Alam merupakan pemenuh kebutuhan manusia dan diciptakan khusus untuk mendukung kehidupan manusia. Segala kebutuhan manusia berupa kekayaan tersedia di alam, manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa segala pendukung kehidupan manusia seperti makanan, bahan untuk tempat tinggal dan pakaian merupakan sumber daya alam yang tersedia di alam. Manusia sudah seharusnya melestarikan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seiring berjalannya waktu, fakta menunjukkan bahwa manusia menjajah dan mengambil keuntungan sumber daya alam itu untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan efek samping setelah melakukannya bagi orang lain.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960-1970), manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah bisa menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata hanya suatu khayalan<sup>1</sup>. Commoner menyatakan bahwa kebergantungan kepada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingbergantungan antara manusia dan lingkungan untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia**, Bandung, 2015, Hal 8

ternyata dikuasi oleh hukum-hukum ekologi<sup>2</sup>. Kondisi ini menyadarkan manusia bahwa lingkungan merupakan suatu ekosistem, di mana manusia adalah salah satu unsurnya. Sebuah sistem akan terganggu apabila ada unsur yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Negara archipelago yang dipenuhi dengan begitu banyak sumber daya alam yang begitu elok nan menawan, baik di bidang pertanian, kelautan dan kehutanan. Negara Indonesia memiliki beragam sumber daya alam di laut seperti terumbu karang, rumput laut, ikan, udang, ganggang dan organisme lainnya. Seluruh organisme tersebut saling berinteraksi serta berhubungan antara satu dan lainnya, begitu juga dengan manusia yang turut memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam Indonesia.

Hal ini dibutuhkan adanya peran pemerintah untuk mengelola sumber daya itu sendiri. Peran pemerintah yang berperan dalam pelestarian lingkungan seperti dalam hal kebersihan lingkungan, pelarangan penembakan liar, larangan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, pelestarian hewan-hewan yang hampir punah dan juga kelestarian tumbuhan seperti penghijauan, penanaman hutan gundul dan lain sebagainya. Tanpa adanya peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam tersebut, maka akan mungkin terjadi kerusakan pada sumber daya alam dan tumbuhan dan hewan langka juga bisa punah.

Pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sumber hukumnya adalah PP No. 27 tahun 2012

---

<sup>2</sup> Daud silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indoonesia**, Bandung, 2015, Hal 8

mengenai izin lingkungan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa segala kegiatan wajib memiliki izin perlindungan lingkungan hidup, dan UU tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada UU nomor 23 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum jelas dalam Bab X ayat (3) pasal 69 mengenai larangan melakukan pencemaran lingkungan hidup, memasukkan benda berbahaya dan beracun, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Aturan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Pasal 103 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kendati demikian, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap UU Nomor 23 tahun 2009 masih sangat minim, dapat di lihat dari tindakan pemerintah pusat maupun daerah/Kota yang begitu lambat dalam merampungkan permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik di Kota Surabaya Jawa Timur dan pembakaran hutan secara tidak bertanggungjawab yang terjadi di beberapa kota di indonesia serta pencemaran ekosistem laut yang kerap kali terjadi akibat limbah dari perusahaan-perusahaan tambang, padahal hal tersebut sepatutnya menjadi fokus utama pemerintah untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang di timbulkan sangat merugikan bagi kelangsungan kelestarian seluruh lingkungan hidup.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, lingkungan tersebut telah berubah menjadi suatu pemukiman padat penduduk. Manusia tidak peduli dan tidak memikirkan kelestarian lingkungan. Membuang sampah atau limbah rumah tangga sembarangan dan pabrik-pabrik membuang limbahnya ke sungai dan laut tanpa memikirkan dampaknya. Alam yang awalnya begitu indah dan menawan, berubah menjadi kotor dan penuh dengan bahan-bahan beracun. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terhadap kehidupan manusia terutama pada kesehatan.

Pengendalian akan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>3</sup> Setiap bagian-bagian pemerintahan memiliki porsi dan ruang lingkup yang berbeda antara satu dan yang lainnya, porsi-porsi tersebut di bagi sesuai dengan ranah kekuasaan dan tanggungjawab mereka.

Isu mengenai pencemaran lingkungan hidup sedang banyak dibahas di media. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang terdapat di bumi ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, serta segala sesuatu yang mempengaruhi alam dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain<sup>4</sup>. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan

---

<sup>3</sup> Djanius Djamin, **Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 23.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 23.

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Saat ini kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun telah memberikan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain yang ada di dunia. Kasus pencemaran lingkungan hidup seperti pembakaran hutan liar, pencemaran-pencemaran limbah pabrik, dan pencemaran zat-zat berbahaya yang tersebar di laut Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan penanggulangan yang tepat untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. dimana permasalahan pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi, diantaranya ada beberapa kasus yang sempat menjadi permasalahan hangat di kalangan masyarakat yaitu Peristiwa kematian ribuan ikan di sungai Surabaya yang kembali terjadi pada 13 November 2013 silam yang sepatutnya menjadi tugas utama pemerintah kota. Menurut Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), hal ini adalah salahsatu bentuk pelecehan yang dilakukan oleh pihak industri terhadap hukum dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Ecoton menyatakan bahwa, kasus kematian ikan itu disebabkan karena turunnya kadar oksigen dalam air, karena tingginya volume

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009

limbah yang dibuang ke sungai oleh industri yang ada di sepanjang sungai Surabaya.<sup>6</sup> Pihak Ecoton menduga yang menjadi penyebab kejadian ini adalah beberapa pabrik atau industri di sepanjang sungai Surabaya. Beberapa diantaranya yang dicurigai adalah pabrik minyak, kertas, serta sabun detergen.

Pihak Ecoton telah mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya dan Perum Jasa Tirta, untuk melakukan penelusuran yang lebih mendetail untuk memantau kualitas air. Somasi yang dilakukan Ecoton pada 31 Oktober lalu yang tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah abai dan lalai terhadap upaya pengelolaan lingkungan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penegasan dari pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan menggugat secara hukum, dan justru hal ini diserahkan pada masyarakat<sup>7</sup>.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelanggaran atas UU Nomor 23 Tahun 2009 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Kali Surabaya oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gempolkerep”, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup semakin menipis, hal itu diperparah dengan peran pemerintah dan badan lingkungan hidup sebagai pengawas dan penegak hukum juga terlihat begitu minim, padahal dampak kerusakan lingkungan hidup begitu berbahaya efeknya bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk.

---

<sup>6</sup> Petrus Rizki, 15 November 2013, **Kematian Ribuan Ikan Sungai Surabaya Kembali Terjadi**, Tempo Hal 1

<sup>7</sup> Ibid., Hal 12



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.
2. Apa kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa sejauhmanakah efektifitas peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait kasus pencemaran kali surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis apasajakah faktor-faktor yang menjadi kendala yang di alami Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali Surabaya oleh limbah pengelolaan pabrik Gempolkerep terhadap pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang keilmuan khususnya dalam ilmu hukum Administrasi Negara yang terkait dengan bidang Pemerintahan mengenai peran lembaga pemerintahan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

### **2. Secara Aplikatif**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat, khususnya kepada pelaku pelaku pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan akan kelestarian lingkungan hidup.

#### **b. Bagi Kalangan Akademisi**

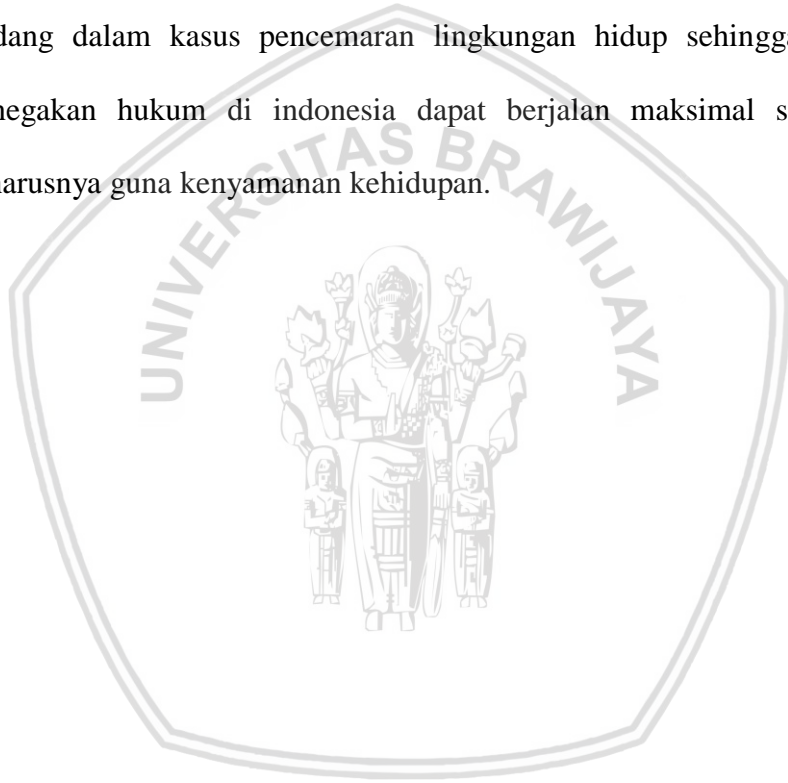
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan hukum administrasi negara serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dan penelitian hukum yang terkait dengan Peran lembaga pemerintahan akan penegakan Undang-Undang.

#### **c. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memberi masukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan peran lembaga pemerintahn terhadap penegakan Undang-undang sesuai dengan kajian hukum administrasi negara.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sekaligus evaluasi bagi penegak hukum khususnya pihak pemerintah terkait dalam melakukan proses pengawasan dan upaya penegakan hukum sesuai dengan undang-undang dalam kasus pencemaran lingkungan hidup sehingga penegakan-penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan maksimal sesuai dengan seharusnya guna kenyamanan kehidupan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang lingkungan hidup

Menurut Ernest Heackel (dalam Ansyari, 1997), lingkungan hidup merupakan pengetahuan dasar mengenai makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi antara satu dan yang lainnya dengan lingkungan yang mereka tinggali. Manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup yang mereka tempati.<sup>8</sup> Dengan demikian lingkungan hidup adalah bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup menjadi kajian ilmu pengetahuan diawali dari seorang ahli biologi yang bernama Ernest Heackel pada tahun 1860. Ernest Heckel memperkenalkan istilah lingkungan hidup atau ekologi. Istilah *ekologi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Logos*. *Oikos* yang berarti rumah, sedangkan *Logos* yang berarti ilmuwan. Berawal dari konsep tentang ekologi yang diperkenalkan oleh Ernest Heackel tersebut mendorong begitu banyak ahli untuk dapat lebih memperdalam konsep tentang lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Para pakar di bidang lingkungan tidak membedakan secara tegas pengertian antara “lingkungan” dengan “lingkungan hidup”, namun yang sering digunakan yaitu istilah “lingkungan” (*enviromtent*) bermakna lebih luas dari pada istilah “lingkungan

---

<sup>8</sup> Fuaad Ansyari, **Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hal 20

<sup>9</sup> Bachrul Amiq, **Penerapan sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hlm 3

hidup” (*life environment*). beberapa pengertian lingkungan dari pakar lingkungan yaitu sebagai berikut.

1. **Salim** lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan yang mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
2. **Soedjono** lingkungan Hidup Sebagai Lingkungan hidup jasmani atau fisik yang meliputi dan mencakup segala macam unsur dan faktor fisik jasmaniah yang berada didalam alam semesta, maka hewan, tumbuh-tumbuhan serta manusia tersebut itu akan dianggap sebagai perwujudan secara fisik jasmani belaka
3. **Munadjat** Danusaputro lingkungan hidup adalah seluruh benda dan daya serta keadaan termasuk yang ada didalamnya manusia serta segala tingkah perbuatannya yang berada-beda dalam ruang dimana manusia itu berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta pada kesejahteraan manusia dan jasah hidup lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian pengertian lingkungan dan pengertian lingkungan hidup yang telah dikemukakan dapat di katakan bahwa antara “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam bentuk pengertian yang tidak berbeda atau sama. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 dimana pada penjelasan pasal I angka (1) yang menyebutkan bahwa :

“Lingkungan hidup yang terdapat disini merupakan suatu sistem yang mencakup lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi

---

<sup>10</sup> Ibid., Hlm. 5

kehidupan dan kesejahteraan seluruh manusia serta untuk makhluk hidup yang lainnya.”<sup>11</sup>

Adapun pengertian lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-undang No 23 pada tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta seluruh makhluk hidup yang lainnya.”<sup>12</sup>

Terdapat suatu hal yang perlu ditekankan dalam pengertian lingkungan hidup atau pengertian lingkungan tersebut bahwa antara suatu unsur dengan unsur lainnya berada dalam suatu lingkungan, merupakan sebuah kesatuan yang sama sekali tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan diantaranya saling mempengaruhi dan berpengaruh, terutama didalam hal kualitas lingkungan itu sendiri. Kendati demikian terdapat suatu kecenderungan yang begitu besar dalam mengadakan pembedaan antara lingkungan biologis, lingkungan sosial dan lingkungan fisik.<sup>13</sup>

Pengertian mengenai lingkungan terbagi atas 3 kelompok dasar yang dimaksudkan dapat memudahkan dalam menjelaskan pengertian akan lingkungan itu<sup>14</sup>:

#### 1. Lingkungan fisik atau *physical environment*

---

<sup>11</sup> Daud silalahi, Dkk, **Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya** Di Indonesia, Bandung, 2015, hlm13

<sup>12</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 12

<sup>13</sup> Ibid., hlm 12

<sup>14</sup> Amsyari, 2013, Lingkungan Hidup (online),  
<file:///C:/Users/USER/Desktop/Pengertian%20Lingkungan%20Menurut%20Para%20Ahli%20%20Pengertian%20-%20Pengertian.htm>, (21 Februari 2016)



Segala sesuatu yang terdapat disekitar manusia dimana terbentuk dari benda mati semisal gunung, kendaraan, udara, air, rumah dan lain-lain.

2. Lingkungan biologis atau *biological envirointment*

Segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup selain yang terdapat pada diri manusianya itu sendiri seperti binatang-binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar serta tumbuh-tumbuhan dari yang paling kecil sampai yang terbesar

3. Lingkungan sosial atau *social envirointment*

Manusia-manusia yang lain yang berada disekitarnya seperti teman-teman, tetangga-tetangga, serta orang-orang yang lain yang belum dikenal.

Kendati demikian, baik lingkungan sosial maupun lingkungan biologis dan lingkungan fisik selalu akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Agar lingkungan tersebut bisa dipertahankan dengan baik kehidupannya dengan secara serasi maka manusia perlu melakukan penyesuaian diri atau melakukan proses adaptasi yang maksimal terhadap adanya seluruh perubahan-perubahan tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan untuk sifat-sifat dari lingkungan hidup itu sendiri ditentukan oleh berbagai macam faktor-faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut yaitu<sup>16</sup>:

1. Jenis dan jumlah yang terdapat pada masing-masing jenis di unsur lingkungan hidup tersebut.

---

<sup>15</sup> Muhammad Erwin, **Hukum Lingkungan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 22

<sup>16</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 23

2. Interaksi atau hubungan di antara setiap unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan hidup.
3. Kondisi nyata atau kelakuan yang terdapat pada unsur lingkungan hidup; dan
4. Faktor non material seperti kebisingan lingkungan , temperatur suhu dan cahaya.

Adanya perubahan-perubahan pada lingkungan yang dimaksudkan disini tentu terdapat menyebabkan perubahan kualitas, yakni sehat atau tidaknya suatu lingan atau baik buruknya suatu lingkungan.

Lingkungan terbagi atas dua yaitu lingkungan *ABiotik* dan lingkungan Biotik:

1. Komponen abiotik atau komponen benda mati semisal tanah, energi, udara dan air.
2. Komponen biotik atau makhluk hidup semisal tumbuh-tumbuhan, mikroba dan binatang.

Berdasarkan dari segi nutrisi atau *trofik*, maka komponen biotik didalam ekosistem tersebut terdiri atas dua jenis yaitu :

1. Komponen *autotrofik*

Kata *autotrofik* itu berasal dari sebuah kata *autos* yang bermakna sendiri dan *trophikos* yang bermakna menyediakan makanan. Komponen *autotrofik* yakni seluruh organisme yang dapat menyediakan atau dapat mensintesis makanannya secara sendiri berupa bahan organik yang bersumber dari bahan-bahan anorganik dengan adanya bantuan *klorofil* dan energi utama yang berupa adanya radiasi sinar matahari. Oleh sebab itu, organisme yang mengandung berupa *klorofil* itu termasuk dalam suatu golongan *autotrof* dan pada umumnya ialah golongan tumbuh-tumbuhan. Pada komponen *nutrofik* akan terjadi suatu pengikatan energi

radiasi matahari dan bersintesis pada bahan *anorganik* yang menjadi sebuah bahan organik yang kompleks.<sup>17</sup>

## 2. Komponen *heterotrofik*

Kata *heterotroik* itu berasal dari kata *hetero* yang bermaknai berbeda organisme yang hidupnya memanfaatkan bahan organisik untuk di jadikan bahan makanannya, sedangkan pada bahan organik yang sudah dimanfaatkan tersebut telah disediakan oleh organisme yang lainnya. Jadi, komponen *heterotrofit* akan memperoleh bahan makanan yang bersumber dari beberapa komponen *autotrofik*, kemudian pada sebagian anggota komponen tersebut akan menguraikan bahan organik komplek ke dalam bentuk bahan anorganik yang secara sederhana dengan demikian maka jamur, jasad renik,binatang termasuk dalam golongan komponen heterotrofik.<sup>18</sup>

Usaha atau berbagai macam aktivitas yang diperkirakan dapat memiliki dampak yang sangat penting terhadap perkembangan dari lingkungan yaitu<sup>19</sup>:

1. Adanya perubahan yang terjadi pada bentang alam dan bentuk lahan.
2. Adanya eksploitasi yang terjadi pada sumber daya alam baik itu sumber daya alam yang telah terbaharui maupun sumber daya alam yang tidak lagi dapat terbaharui

---

<sup>17</sup> Syahrul Machmud, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 23

<sup>18</sup> Ibid., hlm 24

<sup>19</sup> **Pasal 1 ayat 1 pada PIP no. 51 Tahun 1993**

3. Proses dan adanya kegiatan yang secara potensial dapat memunculkan pemborosan, dan suatu kerusakan dan terjadinya kemerosotan pada sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Suatu proses dan aktivitas yang dampaknya bisa mempengaruhi lingkungan budaya.
5. Proses dan adanya kegiatan yang dampaknya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi pada sumber daya alam dan/atau pada perlindungan cagar budaya.
6. Terjadinya proses *introduksi* yang terjadi pada segala jenis tumbuh - tumbuhan, serta jasad renik dan berbagai macam jenis-jenis hewan yang ada.
7. Pembuatan dan adanya penggunaan bahan-bahan hayati dan non hayati,
8. Adanya penerapan teknologi yang telah diperkirakan dapat menimbulkan suatu potensi yang besar yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup,
9. Aktivitas yang memiliki resiko tinggi dan dapat mempengaruhi segala macam bentuk-bentuk pertahanan negara.

Sedangkan, untuk dampak penting yang akan atau kemungkinan terjadi pada suatu usaha atau aktivitas terhadap lingkungan hidup tersebut di tentukan oleh beberapa faktor-faktor<sup>20</sup>:

1. Luas wilayah yang ada pada persebaran dampak dari aktivitas tersebut,
2. Jumlah dari manusia yang telah terkena akan dampak dari aktivitas tersebut,
3. Lamanya waktu akan dampak dari aktivitas terhadap lingkungan hidup tersebut akan berlangsung,

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat 1 PP. No. 51 pada tahun 1993

4. Intensitas terhadap dampak akibat dari aktivitas terhadap lingkungan hidup,
5. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang telah terkena dampak dari aktivitas tersebut,
6. Tidak berbalik atau berbaliknya dampak akan aktivitas lingkungan hidup.

## **B. Penegakan Hukum Lingkungan**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>21</sup>. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Makna penegakan hukum (*law enforcement*) secara khusus adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>22</sup>. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan atau undang-undang yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan dan sanksi yang dapat

---

<sup>21</sup> Jimly, Asshiddiqie, "*Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" (dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006)

<sup>22</sup> Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Bam, Bandung.

dikenakan terhadap para pelangganya yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penegakan peraturan atau undang-undang yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian penegakan hukum seringkali disalah artikan kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dilakukan dengan paksaan (*force*) sehingga cenderung membawa kita dalam opini bahwa penegakan hukum selalu bersifat represif saja atau ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana saja. Padahal penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif. Begitu pula dalam penegakan hukum lingkungan, dimana penegakan hukum meliputi segala segi baik yang bersifat preventif maupun represif.

Penegakan hukum lingkungan meliputi kemampuan petugas penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum lingkungan yang berlaku (*ius constitutum*) dalam pelaksanaannya di lapangan (*ius operatum*). Penegakan hukum lingkungan meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidana terkait kerusakan/pencemaran lingkungan. Upaya penyelamatan lingkungan yang asri tergantung pada kesadaran bersama, baik pemerintah, pengusaha dan dunia usaha maupun masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungan hijau sebagai warisan dan titipan kepada generasi selanjutnya.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan



perizinan. Selanjutnya, dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi<sup>23</sup>.

## **2. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan**

Bentuk penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dalam tiga bentuk, antara lain sebagai berikut.

### **a. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Administrasi**

Penegakan hukum lingkungan dalam hukum administrasi menjadi prioritas dalam penegakan hukum lingkungan. Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi berpijak pada beberapa alasan utama antara lain sebagai berikut.

- 1) Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
- 2) Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
- 3) Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).
- 4) Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.
- 5) Sebagai sarana penecagahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.

---

<sup>23</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup:Jakarta,2009), halaman 20.

- 6) Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpukan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata<sup>24</sup>.

Penegakan hukum administrasi merupakan upaya pertama dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau jika antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan jenisnya ada beberapa jenis sanksi administratif yaitu :

- 1) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila

---

<sup>24</sup> Loc.cit

masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

- 2) Penarikan kembali keputusan dan/atau ketetapan yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi dan lain-lain).

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan dan/atau ketetapan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau diatrik kembali (izin, subsidi berkala)<sup>25</sup>.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran<sup>26</sup>.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pengawasan terhadap pelaku kegiatan dalam pemberian izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 71, 72, 73, 74 dan 75 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemaran yang diatur dalam pasal 76 sampai pasal 83 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Dalam prakteknya,

---

<sup>25</sup> Loc.cit

<sup>26</sup> Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 48

penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif dimulai dari proses perizinan. Sebelum memperoleh izin, setiap kegiatan usaha wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Di dalam izin tercantum rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti syarat mutu limbah yang dapat dibuang dan sebagainya. Pejabat penerbit izin sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang serta berkaitan dengan usaha tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan pemberian izin tersebut wajib diumumkan sehingga memungkinkan peran masyarakat yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin<sup>27</sup>.

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pemberian sanksi yang berbeda-beda itu disebabkan karena bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya jika ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penjatuan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.

---

<sup>27</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2009), halaman 20

#### **b. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Perdata**

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan<sup>28</sup>.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 proses penegakan hukum Lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII penyelesaian sengketa lingkungan pasal 84 sampai dengan pasal 93. Dalam ketentuan tersebut penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa<sup>29</sup>.

#### **c. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Pidana**

Penegakan hukum dari sisi hukum pidana meliputi 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Berikut disajikan penjelasan kedua fungsi tersebut.

##### **1) Fungsi Umum**

Oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

---

<sup>28</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2009),

<sup>29</sup> **Undang-undang nomor 32 tahun 2009**

umumnya, ialah mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

## 2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yakni opsi terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

Lebih lanjut, tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP bertujuan sebagai berikut.

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penegakan hukum lingkungan dari sisi hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Bab XIV Tentang Penyidikan dan



Pembuktian yang masing-masing dijelaskan pada Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Selain itu diatur dalam Bab XV Tentang Ketentuan Pidana<sup>30</sup>.

## **C. Badan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup**

Peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sangatlah penting adanya, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegak sanksi administrasi dari penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui penegakan sanksi administrasinya. Pengawasan dan penegakan sanksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan. Sementara itu badan yang ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi lingkungan hidup disebut Badan Lingkungan Hidup.

### **2. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya beralamat di jalan Jimerto no 25-27, Surabaya.

---

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2009

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota memiliki visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan lima tahunan. Sejalan dengan visi pemerintah kota Surabaya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan di masa yang akan datang, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan visi yaitu menjadi badan lingkungan hidup yang handal, proaktif, dan partisipasif.

Selanjutnya, untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan misi antara lain sebagai berikut.

- 1) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang handal melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan serta sarana dan pra sarana;
- 2) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang proaktif melalui peningkatan pelayanan terhadap perizinan dan permasalahan lingkungan; dan
- 3) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang partisipasif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
- 4) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### D. Kajian Umum tentang Pencemaran

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan seharusnya lingkungan itu berfungsi<sup>31</sup>.

Peristiwa pencemaran lingkungan disebut juga polusi. Zat atau bahan-bahan yang nantinya bahan tersebut akan dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat dimana suatu zat dapat disebut polutan adalah apabila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup<sup>32</sup>. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak

Suatu zat dapat disebut polutan apabila<sup>33</sup>:

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal.
2. Berada pada waktu yang tidak tepat
3. Berada pada tempat yang tidak tepat

<sup>31</sup> Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982

<sup>32</sup> Tresna Sasrawijaya, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal 12

<sup>33</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 8

Sifat polutan adalah :

1. Merusak untuk sementara waktu, tetapi bila benda tersebut telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi<sup>34</sup>.
2. Dapat menyebabkan kerusakan yang nantinya akan berdampak pada lingkungan serta akan dapat menyebabkan kerusakan dalam jangka waktu / kurun waktu yang cukup lama atau bahkan sangat lama.<sup>35</sup>

Menurut dari tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.

1. Pencemaran udara

Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut:

- a. Partikel SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Kedua partikel ini bersama dengan partikel-partikel cair membentuk embun, lalu membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan makhluk hidup. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan<sup>36</sup>
- b. Batu bara yang mengandung zat sulfur melalui proses pembakaran akan menghasilkan zat sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama-sama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini dapat membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan gangguan yang cukup

---

<sup>34</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 10

<sup>35</sup> Dantje T. Sembel., loc.cit

<sup>36</sup> Kidd, Dkk, **Pencemaran Udara Masalah dan Penyelesaian**, Renee, Sarawak, 2012, Hal 12

berbahaya pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan (ispa), perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih<sup>37</sup>.

Sumber polusi udara yang lain dapat pula berasal dari radiasi-radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam lapisan atmosfer dan jatuh di bumi. materi radioaktif ini nantinya akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek dari pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

## 2. Pencemaran air

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai yakni berikut:

- a. Pembuangan sisa limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik yang berbahaya, misalnya, sisa detergen mencemari air.
- b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O<sub>2</sub> di air dapat berkurang dari kadar yang seharusnya, sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air,
- c. Fosfat hasil pembusukan bersama H<sub>2</sub>O dan pupuk pertanian terakumulasi dan kemudian menyebabkan *eutrofikasi*, yaitu penimbunan zat mineral yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang begitu cepat pada alga (*Blooming*

---

<sup>37</sup> Dantje T. Sembel, **Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari**, Jakarta, 2015, Hal 12

*alga*). Akibatnya, tanaman-tanaman di dalam air tidak lagi dapat berfotosintesis seperti seharusnya karena sinar matahari terhalang.<sup>38</sup>

Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan dari minyak bumi, yang berasal dari kecelakaan kapal tanker minyak yang seringkali terjadi. Banyak organisme akuatik yang akan mati atau keracunan karenanya sehingga merusak lingkungan hidup akuatik. Untuk dapat membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Bila terlambat penanganannya, kerugian yang akan di hadapi manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu kelestarian ekosistem laut<sup>39</sup>. Bila telah terjadi pencemaran di air, maka dampaknya akan terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini akan semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

### 3. Pencemaran tanah

Penyebab pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran yaitu :

- a. Sampah-sampah plastik yang sukar untuk dapat di hancurkan oleh tanah seperti botol-botol, karet-karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng.
- b. Detergen yang bersifat non *bio degradable*<sup>40</sup>.
- c. Zat kimia yang bersumber dari buangan pertanian, misalnya insektisida.

---

<sup>38</sup> Fuaad Ansyari, **Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hal 15

<sup>39</sup> Ibid., Hal 16

<sup>40</sup> Ibid., Hal 20



#### 4. Pencemaran suara

Polusi suara disebabkan oleh beberapa hal yaitu oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio/tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran.

Menurut macam-macam bahan yang dapat menyebabkan pencemar dapat di golongankan sebagai berikut:

##### 1. Kimiawi

Berupa zat-zat dengan kadar radio aktif, seperti macam logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, pestisida, detergen dan minyak.

##### 2. Biologi

Berupa unsur-unsur yang memiliki mikroorganisme, misalnya *Escherichia coli*, *Entamoeba coli*, dan *Salmonella thyposa*.

##### 3. Fisik

Berupa bermacam-macam barang yang tidak dapat terurai oleh tanah seperti kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet.<sup>41</sup>

Menurut WHO, tingkat pencemaran dapat didasarkan pada kadar zat-zat pencemar dan juga oleh waktu (lamanya) kontak. Tingkat pencemaran itu dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan<sup>42</sup>, yaitu sebagai berikut.

1. Pencemaran mengakibatkan iritasi atau gangguan yang terjadi pada organ-organ panca indra dan tubuh makhluk hidup serta telah menimbulkan kerusakan pada

---

<sup>41</sup> Rukaesih Achmad, **Kimia Lingkungan**, Andi, Yogyakarta, 2011, Hal 18

<sup>42</sup> Ibid., Hal 20

ekosistem-ekosistem yang lain. Misalnya gas buangan dari kendaraan bermotor yang menyebabkan mata menjadi pedih.

2. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis dan berbahaya. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) di kota Minamata Jepang yang menyebabkan masyarakat terjangkit kanker dan lahirnya bayi cacat.
3. Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga dapat menimbulkan gangguan dan sakit atau hingga kematian dalam lingkungan.

#### **E. Gambaran Umum PG. Gempolkrep**

PG. Gempolkrep adalah anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X). PG. Gempolkrep juga merupakan salah satu dari 11 unit industri gula milik PTPN X yang berada di Jawa Timur, bersama dengan Pabrik Gula (PG) lainnya, yaitu PG Kremboong, PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Djombang Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo dan PG Modjopanggoong.

PTPN X sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.15 Tanggal 14 Februari Tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara dari PT Perkebunan (Eks.PTP 19, Eks.PTP 21-22 dan Eks.PTP 27) yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dan tertuang dalam akte Notaris Harun Kamil, SH No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang mengalami Perubahan kembali sesuai Akte Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH. No. 1 tanggal 2 Desember 2011.

PG. Gempolkrep sendiri sebagai unit industry gula dibawah naungan PTPN X memiliki visi dan misi yang jelas. Adapun visi dari PG. Gempolkrep yaitu menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, misi dari PG. Gempolkrep adalah sebagai berikut.

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan.
2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama team serta organisasi yang profesional.

Adapun, filosofi adalah PG. Gempolkrep adalah menjalankan misi perusahaan memerlukan acuan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sebagai arahan untuk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh integritas, peraturan atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan oleh semua tingkat karyawan, dengan mengikuti aturan yang ada akan memberikan pencapaian prestasi yang merupakan visi perusahaan. Pokok arahan juga disebutkan dalam Company Business Philosophy meliputi: “Integritas, Profesionalisme, Visioner, dan Sinergi.” Dalam produktifitas karyawan di tempat kerja harus tetap tinggi dan budaya kerja harus dipahami dan dilaksanakan, adalah: profesional, produktif, dan pembelajar. Memberikan pelayanan cepat, efektif dan efisien kepada seluruh unit usaha dan atau anak perusahaan PTPN X dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya dan peningkatan mutu kinerja

yang berdaya saing tinggi demi kepuasan pelanggan, stakeholder dan shareholder. Mendorong terwujudnya Efisiensi, Disversifikasi dan Optimalisasi dalam upaya meningkatkan daya saing dan sustainability dengan tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan<sup>43</sup>.

#### **F. Kajian Umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) telah menggantikan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH terdapat kewenangan pemerintah terhadap penetapan sanksi administratif dan di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif bagi pelanggarnya.

Penegakan aturan hukum lingkungan administratif yang berupa pengawasan serta penerapan akan sanksi administrasi dalam UUPPLH telah di atur dengan sangat jelas dalam Bab XII bagian kedua yang meliputi Pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH yaitu :

##### **Pasal 76**

- (1) Menteri, Gubernur atau bupati/walikota berkewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatannya jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

---

<sup>43</sup> Company Profile PG. Gempolkrep

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan terhadap izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan terhadap izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana telah di atur di dalam pasal tersebut merupakan kewenangan dan kekuasaan yang di miliki oleh pejabat administrasi. Apabisa kewenangan tersebut tidak di gunakan atau tidak di laksanakan oleh pejabat daerah maka penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pemerintah Pusat. Aturan tersebut dengan sangat jelas di atur dalam pasal UUPPLH yang menyatakan:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selain dari hal tersebut, bagi perusahaan selaku badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang mengakibatkan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, dapat di jatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Pembekuan atau pencabutan izin di lakukan jika pengusaha atau penaggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk administrasi sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang sebelumnya telah di jatuhkan. Hal ini tertuang dalam pasal 29 UUPPLH yang menyatakan:

“Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76 ayat

(2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.”

Dalam Undang-undang dan juga teori telah di tegaskan bahwa pejabat administrasi berkewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah (*bestuur dwang*). Demikian pula dalam penegakan hukum lingkungan, para pejabat administrasi diberikan kewenangan untuk dapat menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintah. Menurut pasal 80 UUPPLH bentuk-bentuk paksaan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pemindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi dapat menimbulkan pelanggaran;
  - f. Penghentian untuk sementara waktu seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk dapat menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (2) Pengenaan paksaan dapat di jatuhkan tanpa di dahului teguran apabila pelanggaran yang di lakukan dapat menimbulkan:
  - a. Ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. Dampak yang besar dan luas jika tidak segera dihentikan; dan/atau



- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera di hentikan.

### **G. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009**

Peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sangatlah penting adanya, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegak sanksi administrasi dari penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui penegakan sanksi administrasinya. Pengawasan dan penegakan sanksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dicantumkan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini mencakup pula tugas dan kewajiban Badan Lingkungan Hidup selaku unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun peran badan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni pada Bab IX Pasal 63-64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor

---

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8

32 Tahun 2009 Bab IX Pasal 63-64 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut.

### **Pasal 63**

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;

- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 64**

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Setelah menguraikan gambaran umum pada latar belakang di atas, langkah berikutnya adalah dengan analisis seluruh masalah-masalah yang akan diteliti dengan langkah yaitu, penentuan mengenai metode penelitian apa yang akan dipergunakan. Sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas akan dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar serta sesuai sasaran. Peranan dari metode penelitian ini sangatlah penting adanya dan menentukan penelitian yang nantinya akan dibahas. Karena metode penelitian ini telah mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data di dalamnya.<sup>45</sup> Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian yang di angkat, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut yaitu :

##### A. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian dan penulisan hukum, telah dikenal dua macam model metode-metode penelitian yaitu metode penelitian yuridis empiris dan juga metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarena peneliti akan melihat, mengamati dan menganalisis obyek penelitian yang di lihat dari sudut kenyataannya yang terdapat di lapangan, bukan dengan mengkaji peraturan- peraturan atau mengkaji norma-norma dan membandingkannya antara satu peraturann satu dengan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1996, Hlm 215.

yang lainnya seperti halnya yang dilakukan dalam jenis penelitian normatif. Pada penelitian yuridis empiris ini, peneliti akan melihat, mengetahui, mengkaji, mengamati, meniai dan/serta menganalisis hukum dalam arti yang nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat luas khususnya dalam penelitian ini bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Badan Lingkungan Hidup khususnya di Unit penanganan Pencemaran Lingkungan serta upaya pihak Pemerintahan untuk menanganinya. Dengan penggunaan metode penelitian yuridis empiris ini, diharapkan penulis akan dapat menemukan berbagai jawaban serta solusi kongkrit dari pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu penelitian yang di kaji Kasus-kasus tau Fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang di tangani dnegan masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang di tangani dengan berpedoan dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan atas kasus yang berkaiatn.<sup>46</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kota Surabaya. Lebih spesifiknya, penelitian akan dilakukan di Badan Lingkungan hidup Kota Surabaya. Ditentukannya Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 32.

lokasi penelitian dikarena melihat fakta adanya begitu banyak kasus pencemaran Lingkungan Hidup yang terjadi di sana, yang bersumber dari oknum-oknum yang tidak berkepentingan guna keuntungan pribadi yang jumlahnya tiap tahun tidak berkurang dan terus menerus terjadi sehingga dirasa perlu dilakukan penelitian agar didapatkan jawaban mengapa hal tersebut terus terjadi.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :<sup>47</sup>

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang berupa suatu pengalaman, pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, serta pengalaman dari subyek penelitian yakni tersangka kasus-kasus Pencemaran Lingkungan Hidup dan peranan pemerintah khususnya dari Badan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang berupa arsip, dokumen-dokumen, Berkas-Berkas, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, media cetak, surat kabar, media elektronik dan lain-lain. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian ini yang kemudian dihimpun dan diolah oleh penulis berdasarkan penggabungan data primer.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 12.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yakni tersangka Pencemaran Lingkungan Hidup/responden dan Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, melalui penelitian dan teknik memperoleh data.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh melalui sumber yang terpercaya yang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya atau instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi melalui arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi-instansi tersebut. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang dapat diperoleh penulis yakni melalui :

### **1. Data Primer**

Data primer didalam penelitian ini diperoleh dengan cara teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan sebagai informasi dan bahan data guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran data kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur,

undang-undang, tulisan, dan internet yang ada kaitannya dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

## **F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki berbagai kesamaan, meliputi himpunan dari orang-orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi oleh periode dan lokasi tertentu.<sup>48</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

### **2. Sampel dan Teknik Sampling**

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek dari penelitian.<sup>49</sup> Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu anggota unit Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah model *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis sehingga didapatkan sampel yang benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

### **3. Responden**

Responden yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Pencemaran Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan yang merupakan pihak yang berkaitan dalam penanganan,

---

<sup>48</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95.

<sup>49</sup> Ibid. hlm 96.

perlindungan dan pencegahan terhadap faktor penyebab tindak Pencemaran Lingkungan.

### G. Teknik Analisa Data

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah, menelaah, mengidentifikasi dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. teknik analisa data menggunakan :

1. Analisa Deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa data-data hasil dari penelitian dengan cara menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data-data hasil penelitian untuk dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada sehingga selanjutnya pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien.
2. *Content analysis* (Analisis Isi), yaitu menganalisis isi / kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dari subyek penelitian.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang di angkap dalam peneletian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :



- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dalam Bab ini berisikan mengenai berbagai teori-teori dan konsep dasar yang berkenaan dengan Peranan Pemerintah Terhadap Penegakah Hukum Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya). Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Kajian Umum tentang Pemerintah
- b. Kajian Umum tentang Pencemaran
- c. Kajian Umum tentang Lingkungan Hidup

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adapun rinciannya adalah :

- a. Jenis Penelitian
- b. Jenis Pendekatan
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Populasi dan Sampling

g. Teknik Analisi Data

h. Definisi Oprasional

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pembahasan mengenai apa dan bagaimanakah Peranan Pemerintah dalam upaya penegakan hukum akan larangan pencemaran lingkungan hidup, apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak pemerintah selalu pengawas dan penindak akan tindakan menyimpang mengenai pencemaran Lingkungan Hidup.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

##### **I. Definisi Operasional**

Merupakan batasan pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat-pendapat para ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

1. Faktor Penyebab adlah suatu clausa yang menyebabkan seseorng atau suatu lembaga melakukan Penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.

2. Masyarakat dan pihak swasta sebagai lembaga yang di bawah pemerintah adalah pihak-pihak yang seharusnya menaati aturan hukum yang ada di negara tempat ia berdiri atau daerah yang di tempatinya.
3. Pemerintah adalah badan yang berhak/memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum dan berkewenangan untuk menegakkan hukum tersebut serta memberikan sangksi-sanksi yang tegas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggar-pelanggar aturan hukum tersebut tanpa membedakan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut<sup>50</sup>
4. Badan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang berkewenangan untuk mengurus segala macam persoalan yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup

#### JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan	V					
2	Melakukan studi pustaka		V				
3	Menyusun instrumen penelitian		V				
4	Melaksanakan penelitian lapangan			V	V		
5	Menganalisis data					V	
6	Menulis laporan skripsi						V

<sup>50</sup> Ibnu Kencana Syafie, **Pengantar Ilmu Pemerintahan**, PT, efika Aditama, Jakarta, 2013, Hal 13

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Peran pemerintah terhadap pencemaran lingkungan sangatlah penting adanya, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penegak sanksi administrasi dari penegakan hukum lingkungan hidup. Penegakan itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan melalui penegakan sanksi administrasinya. Pengawasan dan penegakan sanksi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan.<sup>51</sup> Sementara itu badan yang ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi lingkungan hidup disebut Badan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya beralamat di jalan Jimerto no 25-27, Surabaya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8

<sup>52</sup> **Sistem Informasi Badan Lingkungan Hidup**, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2015.

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota memiliki visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan lima tahunan. Sejalan dengan visi pemerintah kota Surabaya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan di masa yang akan datang, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan visi yaitu menjadi badan lingkungan hidup yang handal, proaktif, dan partisipasif.

Selanjutnya, untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan misi antara lain sebagai berikut: 1) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang handal melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan serta sarana dan pra sarana; 2) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang proaktif melalui peningkatan pelayanan terhadap perizinan dan permasalahan lingkungan; dan 3) menjadi Badan Lingkungan Hidup yang partisipasif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai fungsi antara lain: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

lingkungan hidup; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan 4) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.<sup>53</sup>

## **2. Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep**

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan seharusnya lingkungan itu berfungsi<sup>54</sup>.

Kasus pencemaran sungai oleh limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep adalah salah satu pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini. Kasus pencemaran ini terjadi di Sungai Berantas dan menyebabkan ribuan ikan di sungai tersebut mati secara menadak. Peristiwa kematian ribuan ikan di sungai Surabaya yang kembali terjadi pada 13 November 2013. Kasus ini ditelusuri pertama kali oleh LSM lingkungan hidup Ecoton (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) bersama 3 LSM lingkungan yang lain. Temuan LSM lingkungan hidup ini menyebutkan bahwa kandungan esterogenik pada kali brantas, menunjukkan adanya pencemaran yang melebihi standar kewajaran, bahkan bila dibandingkan dengan sungai-sungai di negara lain.

---

<sup>53</sup> **Sistem Informasi Badan Lingkungan Hidup**, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2015.

<sup>54</sup> **Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982**



Direktur Eksekutif Ecoton menyatakan bahwa kasus kematian ikan itu disebabkan karena turunnya kadar oksigen dalam air, karna tingginya volume limbah yang dibuang ke sungai oleh industri yang ada di sepanjang sungai Surabaya.<sup>55</sup> Pihak Ecoton menduga yang menjadi penyebab kejadian ini adalah beberapa pabrik atau industri di sepanjang sungai Surabaya. Beberapa diantaranya yang dicurigai adalah pabrik minyak, kertas, serta sabun detergen. Pihak Ecoton telah mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya dan Perum Jasa Tirta, untuk melakukan penelusuran yang lebih mendetail untuk memantau kualitas air. Somasi yang dilakukan Ecoton pada 31 Oktober 2013 tidak mendapat tanggapan positif dari pihak berwenang sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah melakukan kelalaian dalam upaya pengelolaan lingkungan, Hal tersebut di perkuat dengan adanya penegasan dari pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan menggugat secara hukum, dan justru hal ini diserahkan pada masyarakat<sup>56</sup>

Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (Wasdal) BLH Jatim Gono Bilowoseno menyatakan bahwa, berdasar uji laboratorium, limbah PG Gempolkerep memiliki kadar *chemical oxygen demand* (COD) atau kandungan oksigen yang dipengaruhi bahan kimia mencapai 5.533 miligram/liter, padahal standar kandungan COD hanya 100 miligram/liter. Sementara itu, kadar *biological oxygen demand* (BOD) atau kandungan oksigen yang dipengaruhi secara biologis dalam air mencapai 2.742 miligram/liter, padahal standar baku mutunya hanya 60 miligram/liter. Tingginya kadar limbah yang dibuang itulah, yang menyebabkan ribuan ikan di Kali

---

<sup>55</sup> Petrus Rizki, **Kematian ribuan ikan sungai surabaya kembali terjadi**, Tempo, 15 November 2013, Halaman 1

<sup>56</sup> Ibid., Hal 12

Surabaya. Bahkan diyakini, pada saat limbah dibuang, kadar pencemarannya (DOD) pasti lebih dari 10.000 miligram/liter.<sup>57</sup>

Dalam kasus ini, pihak pemerintah daerah mendapat desakan dari berbagai pihak terkait penindakan hukum atas pelanggaran ini. Menurut Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), hal ini adalah salahsatu bentuk pelecehan yang dilakukan oleh pihak industri terhadap hukum dan pemerintah. Pihak Ecoton telah mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya dan Perum Jasa Tirta, untuk melakukan penelusuran yang lebih mendetail untuk memantau kualitas air. Somasi yang dilakukan Ecoton pada 31 Oktber lalu yang tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah abai dan lalai terhadap upaya pengelolaan lingkungan, Hal tersebut di perkuat dengan adanya penegasan dari pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan menggugat secara hukum, dan justru hal ini diserahkan pada masyarakat<sup>58</sup>.

Kejadian ikan mati secara massal 25-29 Mei 2012 termasuk dalam perusakan lingkungan dan pemusnahan spesies-spesies langka di Kali Surabaya. PG Gempol Kerep telah melakukan kejahatan lingkungan yang luar biasa terhadap ekosistem Kali Surabaya karena kali merupakan bahan Baku PDAM Kota Gresik dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, lebih dari 25 Tahun semua pihak sudah mengetahui bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang menjadi 96% bahan baku PDAM, sebagai bahan baku air minum dan kebutuhan setiap hari lebih dari 449.000 Pelanggan PDAM. Seharusnya PG Gempol Kerep menerapkan prinsip kehati-hatian karena limbah cair

---

<sup>57</sup> Anwar, Mujib. 2013. **PG Gempol Kerep Positif Cemari Kali Surabaya**. Tempo Online

<sup>58</sup> Ibid., Hal 12

yang dibuang akan bisa mengontaminasi bahan baku air minum bagi manusia. Hal ini adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh PG Gempol Kerep karena semua warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (UUPPLH 32/2009).

Dalam kasus ini, PG Gempol Kerep terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran UUPPLH 32/2009 Bab VII Pasal 58-61 yaitu terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam kasus ini, PG Gempolkerep terbukti melakukan kelalaian dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Hal ini tidak sesuai dengan UUPPLH 32/2009 Bab VII Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”<sup>59</sup>

Selain itu, PG Gempolkerep juga terbukti melakukan kelalaian dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini tidak sesuai dengan implementasi UUPPLH 32/2009 Bab VII Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 58

- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>60</sup>

Secara keseluruhan, PG Gempolkerep juga ter bukti melanggar beberapa pasal lain dalam UUPPLH 32/2009, yaitu pasal 22-33 tentang Amdal, pasal 34-35 tentang UKL-UPL, pasal 36-41 tentang Perizinan, pasal 47 tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, pasal 60-61 tentang Dumping (pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin), serta pasal 76-83 karena pelanggaran sanksi administratif dan pasal 87 terkait pelanggaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 59

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup adalah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan fungsi tersebut, Badan Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam penegakan Hukum Lingkungan terutama dalam aspek hukum administrasi.

Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup penunjang Pemerintah Daerah juga memiliki peran sebagai bagian dari instrument ekonomi lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 tentang ketentuan umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, dijelaskan pula dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan

demikian, Badan Lingkungan Hidup mewakili pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum lingkungan.

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam upaya penegakan hukum lingkungan terkait aspek hukum administrasi bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pengawasan terhadap pelaku kegiatan dalam pemberian izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 71, 72, 73, 74 dan 75 Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemaran yang diatur dalam pasal 76 sampai pasal 83 Undang-undang nomor 32 tahun 2009.

Penegakan hukum lingkungan lebih diarahkan ke sebagai upaya pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Hal ini pula yang menyebabkan penggunaan hukum administrasi lebih diutamakan dalam penegakan hukum lingkungan. Melalui sanksi administrasi ini dimaksudkan agar Badan Lingkungan Hidup dapat mencegah, menanggulangi, atau menghentikan perbuatan pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB XII pasal 71-83 tentang pengawasan dan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan.



Upaya penegakan hukum melalui sanksi administratif dapat dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan perijinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Sanksi-sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan perusahaan dan pencabutan ijin melalui proses teguran, akan tetapi ternyata ketentuan yang mengatur jenis sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia masih lemah dan bahkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan dari aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum dari aspek hukum administrasi sendiri menjadi jalur utama yang diambil dalam penegakan hukum lingkungan (sebagai *premun meridium*). Namun apabila masih tidak dapat menghentikan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi maka berlaku hukum pidana (sebagai *ultimatum meridium*).

Adapun, penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi lebih diutamakan didasari pada beberapa alasan utama antara lain sebagai berikut.

1. Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
2. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
3. Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).

4. Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.
5. Sebagai sarana penecagahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
6. Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpulan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.<sup>61</sup>

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditunjukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah: a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*); b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*); c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*); d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*); e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa. Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Dalam prakteknya, Badan Lingkungan Hidup memanfaatkan berbagai instrumen dan sarana penegakan hukum administrasi. Instrumen hukum lingkungan administratif, antara lain: 1) Perizinan lingkungan, 2) Amdal/UKL – UPL, 3) Baku

---

<sup>61</sup> Rosa Vivien Ratnawati, **Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup**, Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2009, hlm. 2-3

Mutu Lingkungan, dan 4) Pajak dan retribusi lingkungan. Sementara itu, sarana penegak hukum administratif antara lain: 1) Paksaan pemerintah atau tidakan paksa (*Bestuursdwang*), 2) Uang paksa (*Publiekrechtelijke dangsom*), 3) Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*), 4) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*), dan 5) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa<sup>62</sup>. Pemberian sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan dengan ancaman administratif.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 juga dijelaskan peran Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga dibawah naungan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2009 Bab XII pasal 71-75 tentang pengawasan dan pasal 76-83 tentang pemberian sanksi administratif. Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengawasan ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau izin lingkungan hidup<sup>63</sup>. Dengan demikian BLH sebagai badan pengendali lingkungan hidup di bawah naungan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggungjawaban usaha dan/atau izin lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk pemberian sanksi atas

---

<sup>62</sup> **Sistem Informasi Badan Lingkungan Hidup**, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2015.

<sup>63</sup> **Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup**

pelanggaran, dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 76 yakni terkait bentuk sanksi administrasi atas kelalaian dan pelanggaran hukum lingkungan, yaitu meliputi: 1) teguran tertulis, 2) paksaan pemerintah, 3) pembekuan izin, dan 4) pencabutan izin<sup>64</sup>. Kemudian juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 78 dijelaskan bahwa orang atau badan usaha penanggungjawab pelanggaran hukum lingkungan dalam menjalankan sanksi administrasi tetap harus melaksanakan tanggungjawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Adapun penegakan hukum lingkungan oleh Bdan Lingkungan Hidup Kota dilandasi oleh penerapan UU No 32 Tahun 2009 tahun 90 mengenai hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>65</sup>. Oleh sebab itu, Badan Lingkungan Hidup sebagai badan pengelola lingkungan hidup di bawah naungan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengenai penegakan hukum lingkungan, terutama terkait hukum administrasi. Lebih lanjut, adapun penegakan hukum administrasi oleh Badan Lingkungan Hidup diutamakan untuk urusan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 85 butir (1) terkait penyelesaian sengketa lingkungan yang menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi menyangkut segala urusan penyelesaian masalah di luar pengadilan<sup>66</sup>. Kemudian pada UU No 32 Tahun 2009 pasal 85 butir (2) dijelaskan bahwa tujuan dari penyelesaian masalah di luar pengadilan ini adalah untuk mencaai kesepakatan mengenai ganti rugi tindakan pemulihan, jaminan mengenai tidak akan terulangnya

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

kejadian serupa di masa yang akan datang, dan pencegahan terhadap dampak negatif<sup>67</sup>.

## **2. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Penanganan Kasus Pencemaran Kali Akibat Limbah Pengelolaan Pabrik Gula Gempolkerep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep, Badan Lingkungan Hidup menjadi salah satu pihak memegang peran penting. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup penunjang Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai bagian dari instrument ekonomi lingkungan hidup. Dengan demikian, Badan Lingkungan Hidup turut bertanggungjawab serta berkewajiban dalam penegakan hukum administrasi lingkungan atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Menteri, Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Dengan demikian, Badan Lingkungan Hidup sebagai badan pengelola lingkungan di bawah naungan pemerintah daerah ditetapkan menjadi salah satu lembaga penegak hukum lingkungan.

Dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep sendiri, PG Gempolkerep terbukti melakukan pelanggaran UU

---

<sup>67</sup> Ibid

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini terutama terkait pasal 58-59 UU No 32 Tahun 2009, yaitu terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan .Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”. Begitupun dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 59 ayat (1), dijelaskan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Dalam kasus ini, PG Gempolkerep terbukti menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah berbahaya tanpa menerapkan standart manajemen pengelolaan limbah berbahaya yang telah diterapkan.

Lebih lanjut, PG Gempolkerep juga melakukan pelanggaran terkait ganti rugi dan sanksi atas kelalaiannya mengelola limbah. Seperti dijelaskan sebelumnya, sanksi pemberhentian produksi sementara yang dijatuhkan pengadilan dilanggar oleh PG Gempolkerep dengan alasan tuntutan produksi oleh petani Tebu. dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 87 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Pasal ini terbukti dilanggar oleh pihak PG Gempolkerep dengan tidak menunaikan sanksi yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini menjadi perhatian dalam



penelitian ini, terutama bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menanggapi pelanggaran yang dilakukan PG Gempolkerep terkait UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan administrasi oleh Badan Lingkungan Hidup sendiri terkait aspek hukum administrasi bersifat preventif dan represif. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*)<sup>68</sup>. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum lingkungan administrasi terkait upaya preventif meliputi kegiatan pengendalian lingkungan. Kegiatan pengendalian lingkungan sendiri mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep, Badan Lingkungan Hidup memiliki tanggungjawab menerapkan ketiga upaya pengendalian lingkungan sebagai bentuk upaya preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 13 yang menyatakan bahwa pengendalian pencemaran

---

<sup>68</sup> Susianto, Irwan. 2012. **Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia Serta Penegakan Hukumnya**. Diakses dari <http://denmassetyaki.blogspot.co.id/2012/02/implementasi-hukum-lingkungan-di.html>

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi: a) pencegahan; b) penanggulangan; dan c) pemulihan.

Adapun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketiga upaya ini sudah dilaksanakan. Misalnya sebagai upaya pencegahan, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya mengelola perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi: a) KLHS; b) tata ruang; c) baku mutu lingkungan hidup; d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e) AMDAL; f) UKL-UPL; g) perizinan; h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j) anggaran berbasis lingkungan hidup; k) analisis risiko lingkungan hidup; l) audit lingkungan hidup; dan m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Pasal 14 terkait instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain, meskipun sudah diterapkan, pemanfaatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan belum dilakukan dengan baik. Adanya kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep pada tahun 2012 menunjukkan bahwa upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum dijalankan dengan baik. Menurut fakta di lapangan, menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya lalai dalam hal pengawasan dan pengelolaan izin lingkungan hidup kepada perusahaan industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini terbukti dengan lolosnya PG Gempolkerep dalam penerapan standart baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

amdal, dan UKL-UPL. PG. Gempolkerep sendiri memiliki *track record* buruk dalam pengelolaan penanganan limbah industrinya masih mendapatkan izin operasi produksi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pengelolaan izin lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya masih sangat longgar dan kurang memperhatikan dampak lingkungan.

PG. Gempolkerep sendiri masih memiliki peringkat PROPER dalam kategori BIRU, yang berarti PG. Gempolkerep dianggap telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan. Fakta ini berlainan dengan fakta bahwa sebelumnya PG. Gempolkerep memiliki catatan buruk dalam kasus pencemaran lingkungan dimana pada tahun 2007 bertanggungjawab atas kebocoran beberapa pipa dan terjadi banjir di areal PG Gempol Kerep. PG Gempolkerep yang dianggap telah melakukan kejahatan lingkungan yang luar biasa terhadap ekosistem Kali Surabaya seharusnya mendapatkan perhatian lebih karena berpotensi mengakibatkan pencemaran dan merusak lingkungan. Namun dalam penerapannya penerapan kebijakan perizinan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya masih sangat longgar dan kurang memperhatikan dampak lingkungan. Berdasarkan fakta di atas, menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya sudah melakukan fungsi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup hanya saja dalam prakteknya penerapan kebijakan perizinan masih sangat longgar dan kurang memperhatikan dampak lingkungan.

Berdasarkan data yang terkumpul, diketahui pula bahwa peran Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya dalam pengawasan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga masih belum optimal. Hal ini terbukti

dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep pada tahun 2012, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya terlambat menyadari adanya kebocoran limbah dan pelanggaran hukum lingkungan oleh PG. Gempolkerep. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya belum bisa menerapkan analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup sebagaimana seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU No 32 Tahun 2009 Pasal 14 terkait instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya belum maksimal.

Lebih lanjut, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya juga belum bisa memanfaatkan hak gugat yang dimilikinya untuk menegakkan hukum lingkungan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari kurang tanggapnya Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya dalam penanganan kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep pada tahun 2012. Gugatan kasus pencemaran justru dilakukan oleh ECOTON selaku lembaga swasta pemerhati lingkungan. Hal ini kurang sesuai dengan penerapan UU No 32 Tahun 2009 tahun 90 mengenai hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>69</sup>. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tahun 90, menyebutkan bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya sebagai Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan

---

<sup>69</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

hidup dianggap belum bisa menjalankan hak gugat atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan dengan baik.

Selain itu, upaya pemberian sanksi sebagai bentuk penegakan hukum administrasi lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup juga dianggap kurang tegas. Melihat pemberian sanksi administrasi berupa teguran dan penutupan produksi sementara yang diberikan Badan Lingkungan Hidup kepada PG Gempolkerep yang hanya berlaku beberapa hari menunjukkan kurang seriusnya Badan Lingkungan Hidup dalam menanggapi kasus pencemaran ini. Di sisi lain, pemberian sanksi yang pada akhirnya dilanggar oleh PG Gempolkerep dengan alasan tuntutan produksi oleh petani Tebu juga menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih diremehkan dan belum mendapatkan tanggapan serius baik bagi perusahaan dan Badan Lingkungan Hidup itu sendiri. Pemberian sanksi yang terlalu ringan menunjukkan ketidaktegasan Badan Lingkungan Hidup dalam pemberian sanksi. Sebagai akibatnya, sanksi administrasi tidak memberikan efek jera dan dinilai gagal menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam kasus ini, Badan Lingkungan Hidup dianggap belum menjalankan UU No 32 Tahun 2009 pasal 85 butir (2) dengan baik. Dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 85 butir (2) dijelaskan bahwa tujuan dari penyelesaian masalah di luar pengadilan ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi tindakan pemulihan, jaminan mengenai tidak akan terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang, dan pencegahan terhadap dampak negatif<sup>70</sup>. Sementara itu dalam pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya belum menunjukkan

---

<sup>70</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

penanganan yang layak terkait penyelesaian sengketa pencemaran dan perusakan lingkungan. hal ini ditunjukkan dari pemberian sanksi yang masih terlalu ringan, tidak adanya tuntutan ganti rugi pemulihan lingkungan yang layak, tidak adanya jaminan mengenai tidak akan terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang, dan tidak ada upaya pencegahan terhadap dampak negatif. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya juga dianggap belum tegas dalam menanggapi pelanggaran sanksi administrasi. Hal ini dapat dilihat dari dilanggarnya sanksi penutupan operasi produksi yang dijatuhkan kepada PG. Gempolkerep. Sebagai akibatnya, penegakan hukum lingkungan masih diremehkan dan belum mendapatkan tanggapan serius baik bagi perusahaan dan Badan Lingkungan Hidup itu sendiri. Pemberian sanksi yang terlalu ringan menunjukkan ketidaktegasan Badan Lingkungan Hidup dalam pemberian sanksi. Sebagai akibatnya, sanksi administrasi tidak memberikan efek jera dan dinilai gagal menjalankan fungsi penegakan hukum.

### **3. Kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Kali Akibat Limbah Pengeolaan Pabrik Gula Gempolkerep**

Dalam penegakan hukum lingkungan, ada 6 faktor penting yang menentukan proses penegakan hukum yakni: (1) Faktor-faktor Sosial, Ekonomi, Politik pada Tingkat Makro, (2) Faktor Undang-undang, (3) Faktor eksternal kelembagaan (Antar Lembaga), (4) Faktor Interen Kelembagaan, (5) Faktor Kasus Terkait, dan (6) Faktor



Aparat Individual<sup>71</sup>. Selain itu, usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala<sup>72</sup>. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah. Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan.

Dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi lingkungan adalah kelalaian dalam pengawasaan, ketidaktegasan aparat, dan faktor eksternal kelembagaan. Adanya pelanggaran hukum lingkungan hidup berupa kebocoran limbah PG Gempolkerep menjadi bukti nyata adanya kelalaian dalam pengawasan lingkungan hidup. Hal ini menjadi tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab melakukan pengawsan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai UU No 32 Tahun 2009 pasal 13 yang menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga dengan adanya pelanggaran ini, maka kinerja Badan

---

<sup>71</sup> Widia Edorita, "Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara", (Tesis Sarjana Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007), halaman 54-55.

<sup>72</sup> Wira Saputra, **Penegakan Hukum Lingkungan** (Wirasaputra.word.press.com, 2012)

Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan guna mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Selanjutnya, terkait ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum lingkungan dalam kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep. Dalam kronologi kasus pencemaran kali akibat limbah pengelolaan pabrik gula Gempolkerep, informasi pencemaran pertama disuarakan oleh ECOTON selaku organisasi swasta pemerhati lingkungan. Kasus ini bahkan diketahui setelah adanya ribuan ikan mati di kali Surabaya. PG Gempolkerep sendiri sebagai perusahaan yang bertanggungjawab atas kebocoran limbah sebelumnya juga memiliki catatan buruk dalam kasus pencemaran lingkungan dimana pada tahun 2007 bertanggungjawab atas kebocoran beberapa pipa dan terjadi banjir di areal PG Gempol Kerep. Kebocoran ini menyebabkan Krisis air Kota Surabaya akibat Tutupnya operasional PDAM surya Sembada selama 6 Hari. Selain itu kebocoran ini juga menyumbangkan bahan pembunuh ikan. Bahan baku gula dengan COD dan BOD tinggi langsung membuat sungai menjadi penuh dengan bahan organik dan menyebabkan penipisan oksigen dalam air akibatnya ribuan ikan dari Desa Pening (Jetis Mojokerto) hingga Rolak Jagir Wonokromo (Surabaya).

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini otoritas Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dipertanyakan karena memberikan izin Amdal/UKL – UPL kepada PG Gempolkerep yang terbukti tidak bisa mengusahakan pengelolaan lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sungai sebagai satu kesatuan ekosistem yang menyeluruh adalah penyebab utama terjadinya pencemaran Kali Surabaya. Dengan demikian, di masa yang akan datang diperlukan *exit strategy* sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang *policy* dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup<sup>73</sup>. *Pertama*, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. *Kedua*, adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan seperti diatur dalam Pasal 94 sampai dengan 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ketiga*, adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>73</sup> Agus Wariyanto, **Kendala Penegakan Hukum Lingkungan** (www.suaramerdeka.com, 2007).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya turut bertanggungjawab serta berkewajiban dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 76 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Menteri, Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Penerapan hukum lingkungan administrasi sudah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya kegiatan pengendalian lingkungan sendiri mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Penerapan upaya pengendalian lingkungan ini misalnya pengelolaan perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Dalam pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya dianggap masih belum tegas dalam penerlalu longgar dalam menegakkan sanksi hukum lingkungan administrasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memberi saran sebagai berikut.

1. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu kelestarian lingkungan hidup adalah tanggungjawab bersama untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian, disarankan bagi individu ataupun lembaga untuk mendukung dan menerapkan penegakan hukum lingkungan hidup dengan baik demi tercapainya kelestarian lingkungan hidup.
2. Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja pengendalian lingkungan sendiri mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Selain itu, disarankan pula bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk lebih menindak tegas pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian serupa dengan objek penelitian lain terkait penegakan hukum lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rukaesih. 2011. Kimia Lingkungan. Yogyakarta: Andi Press.
- Amiq, Bachrul. 2013. Penerapan sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amsyari, 2013, Lingkungan Hidup (online),  
<file:///C:/Users/USER/Desktop/Pengertian%20Lingkungan%20Menurut%20Para%20Ahli%20%20Pengertian%20-%20Pengertian.htm>, (21 Februari 2016).
- Ansyari, Fuad. 1997. Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asdak, Chay. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Djamin, Djanius. 2011. Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Erwin, Muhammad. 2012. Hukum Lingkungan. Bandung: Refika Aditama.
- Kidd., Dkk. 2012. Pencemaran Udara Masalah dan Penyelesaian. Sarawak: Renee Press
- Machmud, Syahrul. 2013. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.
- PIP no. 51 Tahun 1993
- PP. No. 51 pada tahun 1993
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2013. Hubungan antara instansi pemerintah, Yogyakarta: Pernadjaja.
- Rahmadi, Takdir. 2013. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasrawijaya, Tresna. 2011. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sembel, Dantje. T. 2015. Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bhan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Silalahi, Daud., dan Kristianto. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia. Bandung: Keni Media.

Siswanto Sunarno, Hukum pemeritahan daerah di indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009

